

**FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KALURAHAN
TRIWIDADI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL**



**DISUSUN OLEH
ANASTASIA VEDRUNA WEA NGOLE
21520086**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**

**FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KALURAHAN
TRIWIDADI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**

Disusun Oleh:

**ANASTASIA VEDRUNA WEA NGOLE
21520086**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PROGRAM STUDI S1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Juli 2025

Jam : 10.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing

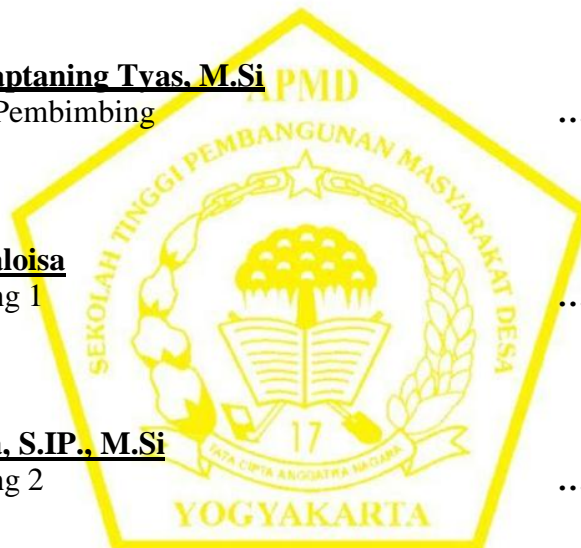
.....

Dr. Rijel Samaloisa
Penguji Samping 1

.....

Analius Giawa, S.IP., M.Si
Penguji Samping 2

.....



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.
NIDN. 051108730

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anastasia Vedruna Wea Ngole

Nim : 21520086

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KALURAHAN TRIWIDADI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL” adalah karya tulis yang saya buat sendiri, dan seluruh sumber yang saya kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab dan menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Juli 2025

Yang menyatakan

Anastasia Vedruna Wea Ngole

MOTTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, “Prove Them Wrong”
“Gonna Fight And Don’t Stop, Until You Are Proud”

“Mintalah maka akan diberikan kepadamu; Carilah maka kamu akan
mendapat; Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu”
(Matius 7:7)

“Bukan saya yang kuat, tapi Tuhan lah yang mempermudah”
(Amsal 16:3)

“Walaupun terlahir dari kedua orang tua yang tidak mempunyai gelar serjana,
Dalam Nama Tuhan Yesus saya bisa menjadi serjana”
(Vedra Ngole)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya:

1. Terima kasih kepada Bapa dalam Surga lewat perantara Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas segala cinta dan berkatnya yang telah diberikan kepada saya dan selalu menyertai saya sepanjang hidup saya.
2. Kepada kedua orang tua tercinta saya, Bapak Yulius Muka dan Mama Maria Selfina Lore yang telah bersusah payah dan sabar dalam membesarkan saya, mendidik saya, selalu mendukung saya, dan mendoakan yang terbaik buat saya selama saya di tanah rantau. Saya sangat berterimakasih untuk sosok orang tua terhebat saya yang membuat saya berhasil bangkit dari kata menyerah. Saya sadar, bahwa saya sampe dititik ini adalah buah dari kerja keras dan doa-doa kedua orang tua saya. Sekali lagi terimakasih banyak untuk kedua orang tua tercinta saya sangat bangga mempunyai kedu orang tua seperti Bapak dan Mama.
3. Untuk kedua saudara terkasih saya, Kakak Nusran, Adek Ochyn, yang selalu memberikan saya nasehat, dan menguatkan saya lewat doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Alm Oma Anas, Opa Lamber, Oma Rosa, Opa Fitalis, dan adik tercinta saya Alm Nona Ignasia Wea, yang selalu menuntun saya, dan mendoakan saya dari atas rumah keabadian surga dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada patner terbaik saya, Fikram Nacu, dan adek ocin ogo, terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya, telah berkontribusi banyak dalam proses penulisan skripsi ini, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya sepanjang pembuatan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dalam hidup saya, harapan saya semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita harapkan.

6. Kepada sahabat terbaik saya Febilia Ester Wonatorei, terima kasih sudah menjadi sosok saudari yang paling baik buat saya selama di jogja, dan selalu mendukung saya, menolong saya, dan memberi semangat buat saya dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Terakhir kepada diri sendiri, Anastasia Vedruna Wea Ngole. Terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidakpastian di perjalanan yang panjang ini, yang seringkali ingin menyerah dan merasa putus asa. Terima kasih karena sudah menemukan kekuatan di dalam kegagalan dan ketidakpastian. Terima kasih juga yang selalu melibatkan Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria untuk menjadi bantu sandaran saya. Saya sangat bangga dengan diri saya sendiri karena telah menjadi pahlawan cerita hidupmu sendiri. Apapun kelebihan dan kekurangan mari kita rayakan untuk diri sendiri. Dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari beberapa pihak yang mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Selamat untuk berpetulangan di level kehidupan yang selanjutnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur, atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh, karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi dengan penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang dengan penuh kesabaran, membimbing, dan memberikan arahan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar, mendidik, dan memberikan ilmu bagi penulis. Terima kasih banyak semoga ilmu yang didapatkan penulis dipergunakan dengan baik.
5. Untuk pihak Kalurahan Triwidadi, terima kasih sudah menerima penulis dan mengizinkan penulis untuk penelitian di Kaluraha Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yogyakarta, 23 Juli 2025
Penyusunan

Anastasia Vedruna Wea Ngole

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Fokus Penelitian	14
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Literatur Review	15
F. Kerangka konsep	19
1. Fasilitasi	19
2. Pemerintah Kalurahan	21
3. Pengembangan UMKM.....	25
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Unit Analisis.....	30
3. Subjek Penelitian.....	31
4. Teknik Pengumpulan Data	32
5. Teknik Analisis Data.....	34
BAB II PROFIL KALURAHAN TRIWIDADI	38

A. Sejarah Kalurahan Triwidadi.....	38
B. Kondisi Geografi	40
C. Secara Tepografi.....	42
D. Secara Geologi	43
E. Kondisi Sosial Politik.....	44
F. Kondisi Demografi	46
1. Jumlah Pendudukan.....	46
2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	46
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	48
G. Keadaan Ekonomi	48
H. Kondisi Sosial	50
I. Pemerintah Kalurahan Triwidadi	51
J. Lega-Lega Kalurahan Triwidadi	53
K. Sarana dan Prasarana Kalurahan	54
BAB III ANALISIS DATA.....	63
A. Bimbingan Pemerintah Kalurahan dalam Pengengan UMKM di Bidang Produksi.....	63
B. Pembinaan Pemerintah Kalurahan dalam Pengengan UMKM di Bidang Sumber Daya Manusia	81
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
PEDOMAN WAWANCARA	101
DOKUMENTASI WAWANCARA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Informan.....	31
Tabel 2. 1 Padukuhan Kalurahan Triwidadi	45
Tabel 2. 2 Data Penduduk Kalurahan	46
Tabel 2. 3 Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan	47
Tabel 2. 4 Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	48
Tabel 2. 5 Perangkat Pemerintahan Kalurahan Triwidadi	52
Tabel 2. 6 Struktur Badan Musyawaratan Kalurahan	54
Tabel 2. 7 Data Pelaku UMKM dan Jenis Usaha.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Wilayah Geografi Kalurahan Triwidadi.....	42
Gambar 2. 2 Struktur Pemerintahan Kalurahan Triwidadi	52
Gambar 3. 1 Pelatihan dan Workshop UMKM.....	71
Gambar 3. 2 Mempromosi Produk Di Media Online (Whattshap).....	73
Gambar 3. 3 Pendampingan Desa Preuner kepada Pelaku UMKM.....	75
Gambar 3. 4 Pelatihan Olahan Nira Kelapa	80
Gambar 3. 5 Pameran Kuliner Kalurahan Triwidadi	82
Gambar 3. 6 Pertemuan Rutin Desa Prima Kalurahan Triwidadi	89
Gambar 3. 7 Promisi Produk lewat Instagram	90
Gambar 3. 8 Produk Desain Batik.....	93

INTISARI

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi antara lain adalah masih terbatasnya fasilitas pelatihan dan pembinaan, kurangnya pendampingan usaha, serta rendahnya akses terhadap fasilitas sarana produksi dan pemasaran. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mendalami bagaimana bentuk fasilitasi dan penyediaan fasilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam mendukung pengembangan UMKM di wilayahnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan berbagai bentuk fasilitasi pemerintah yang berkaitan dengan pembinaan, pelatihan keterampilan kerja, penyediaan fasilitas sarana prasarana produksi, serta pengembangan sumber daya manusia pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Triwidadi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Lurah, Carik, Pamong Ulu-Ulu, Lega Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), serta pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi. Objek penelitian ini adalah bentuk fasilitasi yang diberikan Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan UMKM. Teknik penentuan subjek menggunakan purposive, dengan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Triwidadi telah menjalankan berbagai bentuk fasilitasi untuk mendukung pengembangan UMKM. Bentuk fasilitasi tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana produksi, pelatihan keterampilan kerja, pendampingan dalam proses perizinan usaha, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah juga melakukan promosi produk melalui kegiatan bazar, pameran, dan pemanfaatan media sosial. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala, seperti ketimpangan partisipasi antara UMKM yang sudah tergabung dalam program fasilitasi dan yang belum, kurangnya penyampaian informasi kepada UMKM yang belum tergabung, serta persepsi bahwa program belum menyeluruh baik dalam pelatihan maupun pendampingan lanjutan. Beberapa pelaku UMKM juga masih kurang memahami pentingnya legalitas usaha dan pemasaran digital.

Hal ini penting karena fasilitasi pemerintah merupakan kunci utama dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM yang berperan besar dalam perekonomian lokal. Ketimpangan partisipasi dan kurangnya informasi dapat menyebabkan sebagian pelaku UMKM tidak mendapatkan manfaat dari program yang ada, sehingga potensi pengembangan UMKM tidak optimal. Selain itu, pemahaman yang kurang tentang legalitas usaha dan pemasaran digital membatasi peluang UMKM untuk berkembang di era ekonomi modern. Oleh karena itu, pemerataan informasi dan penguatan koordinasi antara pemerintah dan pelaku UMKM sangat dibutuhkan agar program fasilitasi dapat efektif, merata, dan berkelanjutan, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Triwidadi.

Kata Kunci : Fasilitasi, UMKM, Pemerintah Kalurahan Triwidadi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki potensi ekonomi yang berskala besar di dunia karena mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia, investasi yang memberikan peluang dan keseingan ekonomi khususnya dalam pengengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM ini merupakan salah satu pilar yang penting bagi perekonomian di Indonesia dan memiliki peranan yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masyarakat bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada Tahun 2021 mencapai 64,19 juta, dengan komposisi UMK sebesar 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha. Oleh karena itu UMKM di Indonesia telah berkontribusi 99% dari jumlah total semua perusahaan yang aktif di Indonesia. Tidak hanya itu UMKM juga menyung sekitar 60% dari PDB Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan kepada 108 juta orang di Indonesia. Ini berarti UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia yang mana mewa dampak baik bagi Indonesia di tengah persaingan global. (<https://www.indonesiainvestments.com> diakses 21/11/2024)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, di beberapa

wilayah, termasuk Kalurahan Triwidadi, pengangan UMKM masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta kurangnya inovasi dalam pengelolaan usaha. Abdurohim (2021) menjelaskan bahwa strategi pengangan kelegaan UMKM memerlukan dukungan yang terintegrasi dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan, fasilitasi, maupun pendampingan berkelanjutan. Kondisi ini menuntut peran aktif pemerintah kalurahan untuk merancang strategi yang mampu memperkuat daya saing UMKM melalui pengelolaan sumber daya dan potensi lokal secara optimal.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mehas strategi pengangan UMKM dan pentingnya prosedur operasional yang efektif (Tambunan, 2013; Abdurohim, 2021), namun kajian yang secara spesifik menyoroti peran fasilitasi pemerintah kalurahan dalam mengangkan UMKM di tingkat desa, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, masih terbatas. Penelitian yang ada umumnya berfokus pada tingkat kabupaten atau kota, sehingga belum memberikan garan rinci mengenai implementasi kebijakan di tingkat pemerintahan terendah. Selain itu, studi lapangan yang mengkaji keterkaitan antara kebijakan lokal, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan UMKM di Kalurahan Triwidadi belum banyak dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kualitatif yang mendalam (Sugiyono, 2009).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM sangat mentu perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan

mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia yang harus diperhatikan dan dikengkan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha yang bersifat produktif dan dimiliki oleh perorangan yang berdasarkan untuk tujuan usaha ekonomi produktif di tingkat Desa, yang memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM diartikan sebagai sesuatu bisnis atau usaha perorangan atau rumah tangga yang badan usahanya berukuran kecil, dan pengelolaannya sendiri didasari oleh batasan omset pendapatan pertahunnya. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu, atau badan usaha yang bukan dari cabang perusahaan yang dimiliki atau yang menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha individu, baik sebagai bagian langsung maupun tidak langsung dari anak perusahaan yang dimiliki atau sebagai cabangnya. UMKM juga menjadi bagian integral ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk mewujudkan system perekonomian nasional yang semakin bering dan berkeadilan. Dalam mencapai tujuan tersebut pelaksanaan ekonomi nasional lebih ditekankan pada perekonomian yang pro terhadap ekonomi kerakyatan, berkeadilan, akuntabel memiliki daya saling baik global maupun regional dan transpatasi. Oleh karena itu UMKM juga perlu di kengkan lagi

demi mewujudkan demokrasi ekonomi.(Hakim, H, & Wahyudi, E. Y. (2024) <https://scholar.google.com/> diakses pada 21/11/2024).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan suatu bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dalam skala kecil atau skala menengah. UMKM ini memiliki kedudukan yang strategis dalam mewujudkan system perekonomian nasional jika di kembangkan secara lebih baik.

UMKM ini juga menjadi salah satu bisnis yang banyak diminati oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat karena dengan memanfaatkan sumber daya yang ada masyarakat dapat mengatasi permasalahan karena selain menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian lokal, dan pemberdayaan masyarakat, UMKM ini juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat seperti peningkatan penguatan sumber daya manusia, dan dapat melatih kemandirian pada diri dalam menciptakan hal-hal yang baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dilakukan individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha yang lebih besar. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha ini dapat mencakup berbagai sektor ekonomi dan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan kerja sama dengan berbagai pola kemitraan baik yang dilakukan oleh sesama UMKM maupun kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dengan Usaha Besar.

Berdasarkan konteks Undang-Undang tersebut Peraturan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha. Pada Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Penyelenggaraan Perijinan Berusaha adalah kegiatan perijinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Dan dalam ayat 2 Perijinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perda ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan perijinan berusaha di Bantul. Selain itu dalam mewujudkan Perda tersebut Pemerintah juga telah melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang mencakup pelatihan-pelatihan yang dilakukan setiap tahun, bantul creative expo yang dilakukan setiap tahun untuk mempromosikan produk UMKM dan hasil inovasi daerah, kerja sama dengan berbagai pihak seperti pos Indonesia, sarana dan prasarana dan lain-lain.

Peraturan Daerah ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Daerah Otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kata lain, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan di wilayahnya, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selanjutnya, ayat 12 menegaskan bahwa Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat setempat yang berdiri berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat, sehingga peraturan daerah yang diterbitkan merupakan manifestasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, dalam konteks Kalurahan Triwidadi, Kapenewon Pajangan, Kabupaten Bantul, pemerintah kalurahan memiliki dasar hukum yang kuat untuk memfasilitasi pengangan UMKM sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan adanya hak dan kewenangan yang diatur melalui peraturan daerah ini, pemerintah kalurahan dapat merancang kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal, sekaligus memastikan bahwa pengangan UMKM berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kalurahan Triwidadi. Peraturan Daerah ini didasarkan pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Daerah Otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam ayat 12

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari empat kabupaten yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul memiliki 17 Kapanewon dengan 75 Kalurahan dan 933 Padukuhan. Kabupaten Bantul terkenal dengan berbagai hal seperti wisata alam dan budaya yang menarik, kerajinan, penghasilan ternak, kuliner dan lain-lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 adalah 976.573 jiwa. Oleh karena itu dengan adanya UMKM ini dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Dinas koperasi UMKM mencatat jumlah perkungan UMKM di Bantul pada tahun 2023 adalah 128.000. (<https://bantulkab.go.id> diakses 21/11/2024)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan

menjadi salah satu prioritas pembangunan melalui pemberdayaan dan perlindungan usaha.

Pasal 2 Undang-Undang Desa menyebutkan empat kewenangan desa, yaitu: 1) penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) pembangunan desa, 3) pembinaan kemasyarakatan, dan 4) pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 ayat 12, adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam konteks pengembangan UMKM di desa, kewenangan pemberdayaan masyarakat ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa untuk memfasilitasi pelaku UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Dukungan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari pelatihan, bantuan modal, fasilitasi pemasaran, hingga pendampingan teknis, yang kesemuanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020, kewenangan kalurahan memberikan ruang bagi pemerintah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola urusan pemerintahan dan pengunaan sesuai karakteristik lokalnya. Kewenangan ini tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari hak asal usul

yang menjadi warisan sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu, kewenangan lokal berskala kalurahan memungkinkan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri, termasuk dalam menggenkkan potensi ekonomi seperti UMKM.

Penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun kabupaten turut memperluas lingkup kerja kalurahan dalam memberikan pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah kalurahan memiliki dasar hukum yang kuat untuk merancang kebijakan, melaksanakan program, dan menyediakan fasilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kewenangan tersebut menjadi modal penting bagi Kalurahan Triwidadi dalam mengoptimalkan peranannya untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui penggenan UMKM yang berkelanjutan. Kewenangan Kalurahan juga diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan dalam Pasal 1 bahwa: 1) Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon. 2) Kewenangan Kelurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Kewenangan berdasarkan hak asal usul

adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kalurahan atau prakarsa masyarakat kalurahan sesuai dengan perkengan kehidupan masyarakat. 4) Kewenangan lokal berskala kelurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kalurahan yang telah dijalankan oleh kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh kalurahan atau yang muncul karena perkengan kalurahan dan prakarsa masyarakat kelurahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan regulasi yang memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pengunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui undang-undang tersebut, desa memperoleh alokasi dana desa yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk pengengan ekonomi lokal dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu tujuan utama Undang-Undang Desa adalah menjadikan masyarakat desa sebagai pelaku utama pengunan, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan tetapi juga subjek yang menentukan arah kemajuan desanya.

Dengan kewenangan ini, pemerintah kalurahan memiliki peluang lebih besar untuk memfasilitasi program-program kreatif dan inovatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Undang-

Undang desa ini tidak hanya mewa sumber pendapatan bagi desa saja tetapi mewa hal yang baik bagi masyarakat uantuk mentransformasi wajah desa. Yang artinya Undang-Undang Desa lebih mengutamakan masyarakat desa sebagai subjek atau pelaku utama dan tidak hanya sebagai objek sasaran saja. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan uasaha yang memperhatikan dan memberikan dorongan dalam semua bentuk aspok tatanan kehidupan masyarakat dengan sasaran uantuk seluruh lapisan masyarakat sehinga mereka lebih kreatif, inofasi sehinga mereka dapat mampu mengkitkan kemampuan diri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara berpikir, sikap dan tingkah laku untuk maju karena terkadang mereka tidak mengetahui apa saja potensinya. Oleh karena itu pemberdayaan merupakan salah satu titik yang harus diperluas.

Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Triwidadi merupakan sebuah daerah yang melimpah dengan sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat, letak yang cukup jauh dari pusat kota memberi daya tarik tersendiri, karena dengan begitu suasana pedesaan cukup terasa dan desa ini juga memiliki 22 padukuhan. Kekayaan sumber daya alam yang berupa persawahan, perkebunan, dan pegunungan menjadi alasan tersendiri bagi warga sekitar untuk mempertahankan keaslian daerah tersebut. Berbagai bentuk ragam seni dan budaya juga sangat terlihat di Desa Triwidadi, mulai dari ketropak, wayang, batik triwidadi, tarian, hingga seni lukis. Kalurahan Triwidadi juga memiliki daya tarik wisata seperti: Bendungan Kamijoro, Taman Belanda,

Dam Demen, Sendang Angina-angin dan lain-lain. Sedangkan wisata kulinernya seperti: Gudeg Manggar, Gula Jawa, Sengkek Benguk, Ingkung Ayam, Emping dll. Keberadaan potensi sumber daya alam di Kalurahan Triwidadi dapat memberi kesempatan bagi masyarakat kalurahan untuk mengengkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang jumlahnya kurang lebih 300 UMKM. Potensi-potensi sumber daya alam tersebut dikelola oleh beberapa masyarakat pelaku UMKM untuk mengengkan sebuah bidang kuliner. Ketertarikan yang besar dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mengengkan bisnis di bidang makanan ringan memberi keuntungan tahan bagi pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi. Dan mereka berharap bahwa usaha yang sedang berlangsung dapat memberikan hasil yang positif, khususnya dalam meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM tersebut. Namun, seiring dengan berjalannya UMKM ada beberapa hatan atau kendala yang menghalangi kemajuan UMKM sehingga sulit untuk perkengan. Diantaranya adalah kurangnya pengemasan yang efesien dan menarik, tempat penjual hasil produk, para pengusaha UMKM belum memanfaatkan platform media sosial sebagai strategi penjualan dan alat untuk melakukan promosi sehingga pendistribusian hasil produksi UMKM tersebut belum optimal. Di samping itu, ada pula permasalahan lain yang menjadi penghalang dalam pengengan UMKM, seperti kemasan yang masih sangat dasar dan hanya terbungkus kemasan plastik tanpa lebel. Akibatnya, produk yang dihasilkan oleh UMKM Kalurahan Triwidadi masih kurang besaing dengan hasil produk dari daerah lainnya.

Pemerintah Kalurahan Triwidadi juga memberi fasilitasi rumah kemas sebagai tempat pembuatan ijin usaha yang bertujuan untuk mentu pelaku UMKM untuk mengengakan usaha mereka, bahkan untuk ibu rumah tangga. Hal ini sangat mentu pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi dalam pelatihan pengemasan produk, maupun pemasaran hasil produknya hal ini sangat mewa dampak positif bagi para pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi dalam berusaha dan menyukseskan usaha mereka. Dengan adanya rumah kemas pelaku UMKM dibina, diberi pelatihan, dan diwadahi dalam memasarkan produk-produk baik secara offline maupun online. Namun masih ada beberapa keterbatasan dalam akses pemasaran, fasilitasi pengelolaan yang minim, keterbatasan sumber daya manusia. Sehingga para pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Triwidadi masih banyak kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.

Perspektif dari *Mazhab Timoho* yakni perspektif *Governing* karena fasilitasi sebagai perbuatan pemerintah yang mencerminkan peran aktif pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi masyarakat serta sektor swasta. Sehingga masyarakat bisa mengengakan dan meningkatkan potensi-pontensi yang mereka miliki.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah untuk pengengan UMKM di Kalurahan Triwidadi”

C. Fokus Penelitian

1. Bimbingan Pemerintah Kalurahan dalam pengengan UMKM di bidang produksi
2. Pembinaan Pemerintah Kalurahan dalam pengengan UMKM di bidang sumber daya manusia.

D. Tujuan Dan Menfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengengan UMKM Di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti mengenai peran Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam mendukung Pengengan UMKM di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penulis, baik aspek teori maupun praktik.

b. Manfaat Bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta Pemerintahan Desa mengenai pentingnya peran Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengangan UMKM.

E. Literatur Review

Pada bagian ini penulis akan menyertakan beberapa literature review yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Riyanthi Idayua DKK, dengan judul “Strategi Pengangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pundeglang Banten” Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Pelapo Vol. 7 No 7 (2021), jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Didapatkan hasil yaitu di Desa Nebol Kecamatan Mandalawangi pengangan UMKM belum terlaksanakan dengan baik karena ada permasalahan pada setiap pelaku UMKM seperti permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengenalan teknologi, dan sosial ekonomi. Oleh karena itu strategi yang tepat dilakukan untuk pengangan UMKM di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi yaitu Strategi SO (growth) adalah strategi yang memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya.(Idayu et al., 2021) <file:///C:/Users/ASUS/Downloads> diakses pada 02/12/2024.

2. Ahmad Kholik Setiawan, Dewi Rahmi, dengan judul “Strategi pengenalan UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Tamansari Kota Bandung” Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIB) Vol. 3 No 2 (2023), jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan Analisis SWOT. Didapatkan hasil yaitu di Desa Tamansari Kota Bandung pengenalan UMKM seperti permodalan, pemasaran, legalitas usaha, dan sumber daya manusia yang kurang lancar. Oleh karena itu strategis yang dilakukan untuk pengenalan UMKM di Desa Tamansari Kota Bandung yaitu Strategis SO (*Strengths and Opportunities*), Strategis ST (*Strengths and Threats*), Strategi WO (*Weaknes and Opportunity*), dan Strategi WT (*Weaknes and Threats*) adalah strategi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM sektor makanan dan minuman, mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperkuat kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional.(Ahmad Kholik & Dewi Rahmi, 2023) file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2796_Ahmad+Kholik.pdf diakses 02/12/2024.
3. Nur Dilla Komalasari DKK, dengan judul “Pengenalan UMKM Sentra Kuliner Desa Pekarungan Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Ekonomi Lokal” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.06 No.01 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Didapatkan hasil yaitu UMKM yang dimiliki Desa Pekarungan 225 usaha yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian lokal, salah satu bidang UMKM yang berpotensi di Desa Pekarungan adalah sentra kuliner.

Sektor UMKM kuliner di Desa Pekarungan masih mengalami beberapa masalah dalam mengembangkan usaha mereka. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kepemilikan legalitas, permodalan, serta rendahnya pengetahuan mengenai inovasi produk dan manajemen keuangan.(Komalasari et al., 2022 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads> diakses 02/12/2024)

4. Yenni Vera Fibriyanti, S.E., M.Akt, dkk dengan judul “Pengengan UMKM Kerajinan Anyaman Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan” jurnal Karya Abdi Vol. 4 No. 3 2020. Metode yang digunakan kualitatif. Didapatkan hasil yaitu bahwa masyarakat di Desa Sumberjo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan mereka sangat termotivasi dan tertarik untuk mengembangkan UMKM kerajinan anyaman dengan cara mengikuti sosialisasi, pelatihan dan pendampingan tentang kerajinan anyaman serta pembuatan laporan keuangan karena hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa.(Fibriyanti et al., 2021) <file:///C:/Users/ASUS/Downloads> diakses 02/12/2024.
5. Akmal Fadilah, Alma Nur’azmi Syahidah DKK, dengan judul “Pengengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal” jurnal pengabdian kepada masyarakat Vol. 2 No. 4 2021. Metode ini digunakan kualitatif. Didapatkan hasil yaitu pengengan internal dari kelompok bisnis “Kue Kijang” berfokus pada peningkatan potensi melalui pemanfaatan modal awal, penerapan inovasi dalam

produksi, perluas jaringan distribusi, dan penyediaan fasilitas usaha yang memadai. Selain itu, dukungan dari pihak UKM Kecamatan Deyeuh Luhur membuka akses bagi UMKM ke berbagai sumber-sumber pemasaran, menyelenggarakan kegiatan promosi produk, memperluas jangkuan pemasaran produk, serta memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan. Namun sejumlah pengusaha mengalami kendala akibat kenaikan harga bahan baku, keterbatasan tenaga kerja, dan masalah terkait permodalan, serta banyak tantangan lainnya. (Fadilah et al., 2021) <File:///C:/Users/ASUS/Downloads> diakses 02/12/2024.

6. Buyung Romadhon, Akhmad, dkk, dengan judul “Pemberdayaan UMKM Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gowa” jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 6 No. 2022. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Didapatkan hasil yaitu ada beberapa kesulitan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM di Kabupaten Gowa adalah rendahnya produktivitas, terbatasnya akses UMKM pada sumber daya produktif. Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis SWOT dalam pengengan UMKM.(Romadhoni et al., 2022) <file:///C:/Users/ASUS/Downloads> diakses 02/12/2024.

Berdasarkan dari keenam Literatur Review di atas terhadap peneliti terdahulu yang meneliti, maka ada terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam peneliti ini. Persamaan dari peneliti terdahulu dan peneliti ini yaitu mehasan hal yang sama terkait fasilitasi yang diberikan pemerintah

kalurahan dalam pengangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kalurahan Triwidadi. Sedangkan perbedaannya terdapat di fokus penelitiannya, yang dimana fokus penelitian ini berkaitan dengan Bimbingan pemerintah kalurahan dalam pengangan UMKM di bidang produksi, Pembinaan pemerintah kalurahan dalam pengangan UMKM di bidang sumber daya manusia. Hal tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah kalurah dalam pengangan usah mikro kecil dan menengah (UMKM).

F. Kerangka konsep

1. Fasilitasi

Menurut Sumpeno (2009) proses fasilitasi adalah tindakan kursial yang dijalankan oleh pendamping dalam memperdayakan masyarakat. Istilah ini sering dipergunakan oleh para praktisi serta aktivis di bidang pengangan masyarakat untuk merujuk pada jenis intervensi atau bantuan yang diperlukan guna meningkatkan ketrampilan individu, kelompok, atau organisasi masyarakat. Dengan kata lain, fasilitasi menjadi elemen vital dalam setiap aktivitas, program, atau organisasi yang dirancang untuk memudahkan proses pembelajaran. Dalam pengangan, fasilitasi dapat dihubungkan dengan metode pendampingan, dukungan atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Secara literer, fasilitasi berarti “Upaya memberi kemudahan”, kepada siapa saja untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya manusia dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Biasanya kegiatan ini melibatkan pelibatan tenaga, pendamping,

sukarelawan, atau pihak yang bertugas memberikan pendidikan, penjelasan, dan pengarahannya agar masyarakat sebelumnya tidak paham menjadi lebih mengerti, termotivasi untuk bertransformasi.

Menurut (Mochran 2014), fasilitasi dapat diartikan sebagai proses yang mendukung peserta supaya belajar secara optimal melalui aktivitas-aktivitas yang membantu individu dan kelompok dalam meraih atau meningkatkan pemahaman yang lebih dalam. Fasilitasi adalah proses atau tindakan yang dilakukan untuk mempermudah, mendukung atau memperlancar suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Fasilitasi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk ekonomi, pendidikan, maupun organisasi. Pada umumnya, fasilitasi bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih mudah, bagi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan mereka. Fasilitasi juga seringkali dilakukan oleh seorang fasilitator yang berperan sebagai pengarah atau pemimpin yang membantu mengelola dan mempermudah proses kegiatan atau menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini, fasilitasi bukan berarti memberi solusi langsung, tetapi lebih kepada mendukung proses sehingga dapat menemukan solusi atau mencapai kesepakatan bersama. Dan fasilitasi juga dapat diterapkan di berbagai konteks, seperti pelatihan, penyelesaian masalah, dan lain-lain.

Hogan, Roberts (2020) menyatakan fasilitasi mencakup tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membuat proses kelompok lebih produktif dengan memanfaatkan ketrampilan komunikasi, penyelesaian masalah, dan pengelolaan dinamika kelompok yang efektif untuk memecahkan isu-

isu yang kompleks. Fasilitasi juga lebih dianggap sebagai tindakan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kolaborasi antara berbagai pihak dalam suatu kegiatan, baik itu dalam organisasi, atau masyarakat agar tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih mudah.(Suharno, 2014)

Dari beberapa pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitasi merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, baik pemerintah maupun organisasi lainnya, guna mendukung dan memberikan arahan kepada kelompok atau individu dalam proses pengenalan menuju kemandirian.

2. Pemerintah Kalurahan

Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebut pada Pasal 1 bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan penggunaan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan. Peraturan-peraturan ini memuat tentang susunan organisasi pemerintah kalurahan yang terdiri dari Lurah sebagai kepala Pemerintah Kalurahan dan Pamong Kalurahan berkedudukan sebagai pentu Lurah. Pamong Kalurahan terdiri dari: *Pertama*, Sekretariat dipimpin oleh Carik dan dibantu oleh unsur staf sekretariat serta memiliki tiga urusan teknis, yaitu meliputi: Tata Laksana yang merupakan sebutan dari Urusan Tata Usaha dan Umum, Danarta yang merupakan sebutan dari Urusan Keuangan dan Pangripta yang merupakan sebutan dari Urusan Perencanaan. *Kedua*, Pelaksanaan teknis merupakan unsur pentu Lurah sebagai pelaksanaan tugas operasional. Pelaksanaan teknis terdiri dari Keamanan yang merupakan sebutan dari seksi Pemerintahan dan dipimpin oleh Jagabaya dan Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan yang dipimpin oleh Kamituwa. *Ketiga*, Pelaksanaan Kewilayaan yang merupakan unsur pentu Lurah. Satuan kewilayaan disebut Padukuhan yang dipimpin oleh Dukuh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab 1 ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau sebutan lainnya yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai komponen penyelenggara Pemerintah Desa. Struktur Pemerintah Desa mencakup Kepala Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa yaitu meliputi Sekretaris Desa, Pelaksana teknis lapangan, Unsur kewilayaan,

serta perangkat desa yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat. Posisi sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Menurut Widjaja (2003:27 dan Nurjanah, 2019), “Kepala Desa adalah otoritas tertinggi di desa dan berfungsi sebagai pemimpin baik secara formal maupun informal, yang selalu berada waktu berada di tengah masyarakat yang dipimpinnya. Kepala Desa memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pemerintah desa kepada bupati atau walikota, memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada BUMDes, serta menyampaikan laporan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemerintah desa. (Minahasa, n. d.) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh warga Desa yang merupakan warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat dan prosedur pemilihan yang diatur oleh peraturan daerah berdasarkan pedoman pada peraturan pemerintah. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan akan ditetapkan sebagai Kepala Desa.

Pemerintah Desa memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Peran serta tanggung jawab di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemdes bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintah desa secara umum, yang meliputi pengatur urusan desa, perencanaan pungan, serta pelayanan publik.

b. Pelayanan Masyarakat

Pemdes bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pelayanan administrasi kependudukan (pencatatan kelahiran, kematian, KTP, kartu keluarga dan lain-lain).

c. Pengunan Desa

Pemdes berperan dalam merencanakan dan melaksanakan pengunan desa yang mencakup pengunan infrastruktur, sosial, serta ekonomi.

d. Pengelolaan Keuangan Desa

Menyusun dan mengelola anggran pendapatan dan belanja desa (APBDes), serta memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel

Perbuatan Pemdes adalah tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan oleh Pemdes dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti:

1). Menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan desa (APBDes), 2). Melaksanakan program pengunan desa, 3). Mengadakan pelatihan program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat desa dan lain-lain. Pemdes juga memiliki peranan penting dalam mewujudkan desa yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan, dengan menjalankan berbagai tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan masyarakat di desanya. Sebagai pemimpin utama dan tertinggi yang memikul bertanggung jawab

atas berbagai kegiatan yang dilakukan dalam wilayahnya. Akan tetapi, perangkat desa yang meliputi pelaksanaan kewilayahan, sekretaris desa, dan pelaksanaan teknis perangkat desa masing-masing memiliki bertanggung jawab untuk mendukung kepala desa dalam melaksanakan tugas dan haknya. Perangkat desa juga diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasi dengan Camat mewakili Bupati atau Walikota. Dalam menjalankan tugas mereka, mereka wajib bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

3. Pengembangan UMKM

UMKM adalah sebuah usaha yang berperan penting bagi kemajuan ekonomi di Indonesia, sehingga pelaksanaannya harus dimaksimalkan dan potensi-potensi yang ada perlu dieksplorasi keli untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Tentu saja penguatan ini akan lebih baik dengan dukungan dari pemerintah dan penyediaan fasilitas yang diperlukan sebagai pendukung dalam pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan, agar dapat menghasilkan produk berkualitas yang mampu bersaing di pasar global.(Luz. A. Einsiedel, 1968, h. 9)

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat berfungsi sebagai penyangga dalam menghadapi krisis ekonomi. Pengembangan UMKM sangat penting untuk memacu perekonomian nasional, mengingat bahwa jenis usaha yang dijalankan mencakup hampir semua sektor, sehingga kontribusi UMKM sangat signifikan dalam

meningkatkan penghasilan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.(Anggraeeni, 2013)

Pengangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pengunan ekonomi nasional. Hal ini karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan, pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengengannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifk dalam mempercepat perubahan structural, yaitu meningkatkannya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.(Sudiarta, 2014)

Dampak dari pengangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Indonesia serta pengaruh keterlibatan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor ini memberikan efek positif, baik secara langsung maupun tidak langsung.(Tambunan, 2009:04) Pada dasarnya, pengangan UMKM adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan dengan mempertingkan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, sehingga perlu dilakukan sebagai upaya, seperti menciptakan lingkungan yang mendukung penyediaan askses permodalan, menciptakan suasana usaha yang baik, memberikan perlindungan bagi pelaku usaha, melakukan pelatihan mengun kemitraan, serta meningkatkan promosi dan kolaborasi yang setara.(Hafsah 2024-44) (Alyas, 2017) <file:///C:/Users/Downloads> diakses 04/12/2024.

Beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengengan UMKM adalah upaya atau strategi yang bertujuan untuk mendorong atau mengubah tingkat usaha ke arah yang lebih baik melalui peningkatan usaha, kualitas produk, dan keterampilan atau kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaku UMKM dengan melibatkan berbagai pihak di dalamnya seperti pemerintah, dan dunia usaha masyarakat. Namun seringkali yang terjadi di lapangan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan UMKM masih tergolong rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan, pendampingan, permodalan dan lain-lain.

Pengengan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tindakan metode atau langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan sesuatu. Pengengan ini merupakan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan (Abdurohim, 2021:2008) berpendapat pengengan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah desa, masyarakat, serta pihak-pihak lainnya untuk meningkatnya produktivitas, meningkatkan daya saing ekonomi dengan memperkuat kewirausaha yang ada, memanfaatkan inovasi, beradaptasi dengan pasar dan menerapkan teknologi yang baru.

Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengengan usaha dalam bidang:

- 1) Produksi Dan Pengelolaan
- 2) Pemasaran
- 3) Sumber Daya Manusia; dan
- 4) Desain Dan Teknologi

b. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

Dalam hal ini untuk meningkatkan teknik produksi dan pengelolaan dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan bahan baku dan kemasan bagi UMKM. Dalam Melaksanakan Pemasaran harus menyediakan sarana seperti penyediaan rumah dagang, dan promosi UMKM dan dalam hal pengangan dalam bidang sumber daya manusia harus meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta mampu menguasai teknologi untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.

Pada Pasal 16 ayat 1 huruf c dikatakan bahwa pengangan UMKM dalam bidang sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. memasyarakatkan dalam membudayakan kewirausahaan
2. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
3. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan menciptakan wirausaha baru.

Berdasarkan tiga poin tersebut, perlu adanya perbaikan dalam kualitas sumber daya manusia karena merupakan salah satu komponen paling penting dalam upaya pengangan UMKM. Ini diharapkan dapat menghasilkan individu yang mandiri dalam berwirausaha dan mampu bertahan di berbagai situasi. Selain itu, mereka tentu harus memiliki kemampuan untuk menghadapi resiko sehingga usaha yang dijalankan dapat terus berkeng dalam menghadapi persaingan ekonomi ditengan pasar global. Di dalam pengangan UMKM yang perlu dikengakan yaitu: a. perluas jaringan pemasaran produk UMKM, b. peningkatan kualitas produk, c. peningkatan sumber daya manusia, d. meningkatkan inovasi-inovasi baru. Pengangan pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Untuk mmengatasi masalah-masalah yang dihadapi palaku usaha maka perlu beberapa langka sebagai berikut: memberikan bantuan permodalan, melindungi usaha, memperkuat kerja sama, dan mengengakan kemitraan.

Dalam upaya pengangan UMKM ada beberapa hal yang harus dikengakan seperti:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- b. Peningkatan kualitas produk
- c. Meningkatkan inovasi-inovasi baru
- d. Pengadaan saran dan prasaran produksi
- e. Peningkatan dan desain teknologi

f. Pemasaran

Berdasarkan dengan hal di atas bahwa ada beberapa hal yang perlu dikengakan di dalam pengengan UMKM agar pelaku UMKM dapat berdaya saing dan memperhatikan beberapa aspek tersebut UMKM lebih berkeng dan unggul dalam menciptakan usaha dan peluang. Pengengan UMKM yang yang terdapat di Kalurahan Triwidadi bahwa pemerintah sudah berupaya melakukan berbagai pelatihan, memfasilitasi, dan program-program yang dapat menunjang keberadaan UMKM guna meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku UMKM.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mengggarkan fenomena yang terjadi secara nyata berdasarkan temuan-temuan di lapangan seperti kata-kata, atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang amati. Menurut Suharsimi Arikunto (2003:3) menjelaskan penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lainnya yang kemudian dijabarkan kedalam laporan penelitian.

2. Unit Analisis

Menurut (Sugiyono, 2017:39) pengertian objek penelitian adalah “suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Hidayat, 2019).

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah suatu target atau hal yang akan menjadi fokus yang akan diteliti oleh seorang peneliti untuk dipelajari lebih dalam mengenai UMKM Di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, organisasi atau barang yang dijadikan narasumber atau informan dalam memberikan informasi mengenai topik pada penelitian. Narasumber atau informan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menentukan sejauh mana mengenai UMKM oleh Pemerintah.

Penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*. Konsep tentang *purposive* menurut Notoatmodjo (2018), yaitu dengan memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh peneliti sendiri. Hal ini berarti peneliti memilih individu-individu dan tempat yang akan diteliti karena secara spesifik mereka akan memberi pemahaman mengenai problem fenomena di dalam studi tersebut.

Informan adalah orang yang mampu memberi informasi kepada peneliti mengenai masalah yang ingin diketahuai oleh penulis informan merupakan orang yang mengetahui dan memahami tentang kasus yang sedang diteliti atau yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya:

Tabel 1. 1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
----	------	---------

1	Slamet Riyanto	Lurah
2	Anita Yulia Fatmawati	Carik
3	Mulyadi	Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu)
4	Abdurahman	Lega Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal)
5	Isman	Pelaku UMKM
6	Astuti	Pelaku UMKM
7	Ruliyah	Pelaku UMKM
8	Ariyanti	Pelaku UMKM
9	Tumini	Pelaku UMKM

Sumber data: Hasil Wawancara Peneliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2014:398) ada beberapa macam teknik pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan), *depth interview* (wawancara) dan dokumentasi. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, teknik yang akan digunakan oleh peneliti (Afifah, I., & Sopiany, 2017), adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang teratur mengenai gejala yang terlihat pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan dilakukan dengan menggunakan kelima indra peneliti, sering kali dibantu oleh alat atau perangkat tertentu, kemudian direkam untuk tujuan ilmiah. Pengamatan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan di sekitar Kalurahan Triwidadi. Observasi dilakukan secara langsung, di mana peneliti melihat dan

mencatat objek yang diamati, yaitu UMKM serta masyarakat sebagai pelaku UMKM yang dikengkan oleh Pemerintah Kalurahan Triwidadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sesuai dengan tujuan tertentu. Teknik wawancara ini adalah suatu strategi yang digunakan oleh para peneliti kualitatif untuk terjun langsung ke lapangan penelitian untuk mewawancarai isu-isu yang diangkat. Adapun beberapa proses yang dilakukan peneliti meliputi memperkenalkan identitas peneliti, menulis identitas narasumber, memberi pertanyaan yang lebih luas dan mendalam, dan mempersiapkan alat untuk rekam/foto dan alat tulis. Peneliti akan mewawancarai lurah, carik, pamong ulu-ulu, pelaku UMKM. Dengan melakukan wawancara dengan pejabat pemerintahan kalurahan, pelaku UMKM, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai upaya pengengan UMKM. Peneliti melakukan teknik wawancara dengan menentukan tujuan wawancara, membuat informan wawancara, pelaksanaan wawancara, membuat catatan dari hasil wawancara, dan menganalisis hasil wawancara tersebut. Orang-orang yang diwawancara peneliti, yaitu Lurah, Carik, Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu), Lega Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), dan pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Triwidadi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan informasi yang bersumber dari dokumen atau catatan yang telah tersedia. Dokumen dalam penelitian ini mencakup berbagai bentuk, seperti sumber tertulis (peraturan perundang-undangan, peraturan bupati, laporan tahunan, arsip administrasi kalurahan), dokumen visual (foto kegiatan, gar produk UMKM, poster promosi), media cetak (artikel surat kabar, majalah, brosur), serta karya monumental lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian (misalnya piagam penghargaan UMKM atau sertifikat pelatihan). Menurut Imam Gunawan (2013:178), dokumen berfungsi sebagai sumber data pelengkap yang dapat memperkuat hasil penelitian. Dokumen juga dapat berupa transkrip, buku referensi, dan publikasi akademik yang berkaitan dengan pengengan UMKM. Pemanfaatan metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan terverifikasi melalui studi pustaka dan penelusuran arsip. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendukung dan memperkuat informasi yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara, misalnya dengan memotret proses wawancara, mengumpulkan salinan peraturan desa, laporan kegiatan pemberdayaan, dan arsip administrasi terkait UMKM di Kalurahan Triwidadi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dikumpulkan melalui wawancara, catatan langsung, dan dokumentasi. Proses ini dikenal sebagai analisis data, yang meliputi pengelompokan dan penyusunan data kedalam pola, kategori, dan unit dasar sehingga tema dapat dikenali dan hipotesis kerja dapat dirumuskan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh data (Mathematics, 2016).

Analisis data juga mencakup proses pencandraan (*description*) serta penyusunan transkrip wawancara dan bahan lain yang telah diperoleh. Maksudnya, tujuan dari proses ini adalah agar peneliti dapat meningkatkan pemahaman tentang data tersebut dan menyampaikan kepada orang lain dengan cara yang lebih jelas mengenai apa yang telah dikemukakan atau didapatkan dari lapangan (Moleong, 2017:248).

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi dalam catatan lapangan mencakup dari dua elemen, yaitu deskripsi dan reflesi. Catatan deskriptif berfungsi sebagai data alami yang menggambarkan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami peneliti tanpa melibatkan pendapat atau penafsiran peneliti terhadap fenomena yang ditemui. Sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar dan tafsiran peneliti mengenai temuan yang ada, serta menjadi dasar rencana untuk pengumpulan data ditahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan (Raibowo et al.,

2019). Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan tahap ini pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian, hal ini peneliti langsung berinteraksi dengan informan yang menjadi subjek penelitian.

b. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan suatu tahapan yang melibatkan pemilihan, penekanan, penyederhanaan dan abstraksi. Metode untuk mereduksi data bisa dilakukan dengan cara seleksi membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip penelitian yang bertujuan untuk memperjelas, mempersingkat dan memfokuskan, serta membuang bagian informasi yang kurang relevan sehingga dapat ditarik kesimpulan (Saputra & Semarang, 2021). Dalam melakukan reduksi data peneliti memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas. Tujuannya untuk mengidentifikasi hal-hal pokok, tema, dan pola yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang direduksi dapat memberikan informasi yang lebih akurat. Dengan demikian peneliti dapat lebih mudah melakukan pengumpulan data selanjutnya dan meningkatkan hasil penelitian.

c. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan sekelompok informan tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan

pengambilan langkah. Agar penyampaian data tetap fokus pada inti permasalahan, maka data bisa diwujudkan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan yang berfungsi sebagai petunjuk informasi tentang peristiwa yang terjadi. Data disusun sesuai dengan apa yang diteliti (Rachmawati at al., 2020). Penyajian data adalah tahap penyampain data yang dipilih dan dikelompokan secara sistematis baik dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam menyimpulkan data yang telah dipilih, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang lebih baik.

d. Penarikan Kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*)

Penarikan dan pengujian kesimpulan merupakan upaya untuk menemukan atau memahami makna, serta pola keteraturan dalam penjelasan, dari hubungan sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang dibuat langsung segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan keli sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih akurat. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui diskusi. Hal tersebut diambil agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang dihasilakn menjadi kuat. (Lestari, 2019). Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data yang dimana peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang disajikan dan dianalisis. Kesimpulan ini merupakan sintesis prose hasil temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian.

BAB II

PROFIL KALURAHAN TRIWIDADI

A. Sejarah Kalurahan Triwidadi

Kalurahan Triwidadi adalah penggabungan tiga kalurahan yang terdiri dari Kalurahan Kersan, Trucuk dan Sokodadi. Kalurahan Kersan terdiri dari 11 Padukuhan, Kalurahan Trucuk terdiri dari 5 Padukuhan, dan Kalurahan Sokodadi terdiri dari 6 Padukuhan. Melalui musyawarah para tokoh pada masa itu memilih yang memimpin kalurahan yang selanjutnya disebut Lurah dengan pertingan para tokoh pada waktu yang bisa menulis *latin* karena sebagian besar para tokoh pada masa itu biasa menulis dengan Aksara Jawa selanjutnya dipilih Bapak Harjo Seotomo sebagai Lurah di Kalurahan Triwidadi serta selanjutnya dilakukan pemilihan aparatur Kalurahan seperti Carik, Jogoboyo, Kemakmuran, Kamituwo, dan lain sebagainya.

Pada pelaksanaan pemilihan Lurah, Slamet Riyanto dipilih menjadi Lurah terpilih dan dilantik pada tanggal 30 Maret 2008 untuk menjabat sebagai Lurah Kalurahan Triwidadi pada masa periode 2008 s/d 2014. Sebelum masa berakhir masa jabatan Slamet Riyanto dilaksanakan pemilihan Lurah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa. Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2013 Slamet Riyanto kembali menjadi Lurah Triwidadi untuk masa jabatan 2014 s/d 2020 dan dilantik pada tanggal 30 Maret 2014.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa juga keli ada perubahan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dengan berlakunya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Yogyakarta yang selanjutnya diatur dalam Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan yang tertuang dalam pasal 1. Dengan berakhirnya masa jabatan Slamet Riyanto sebagai Lurah Desa masa periode 2014 s/d 2020 diselenggarakan pemilihan Lurah yang pada awalnya akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2020, namun kondisi adanya suatu bencana wabah covid-19 pelaksanaan pemilihan Lurah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020.

Pelaksanaan pemilihan Lurah Tahun 2020 mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana dalam pasal 39 ayat 1 Kepala Desa memegang jabatan selama 6 Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan ayat 2 Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam pelaksanaan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang waktu tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah serentak Tahun 2020. Pada pelaksanaan pemilihan Lurah serentak di Kabupaten Bantul Tahun 2020 Slamet Riyanto keli menjadi calon Lurah Triwidadi terpilih untuk masa jabatan Lurah Tahun 2021 s/d 2026.

B. Kondisi Geografi

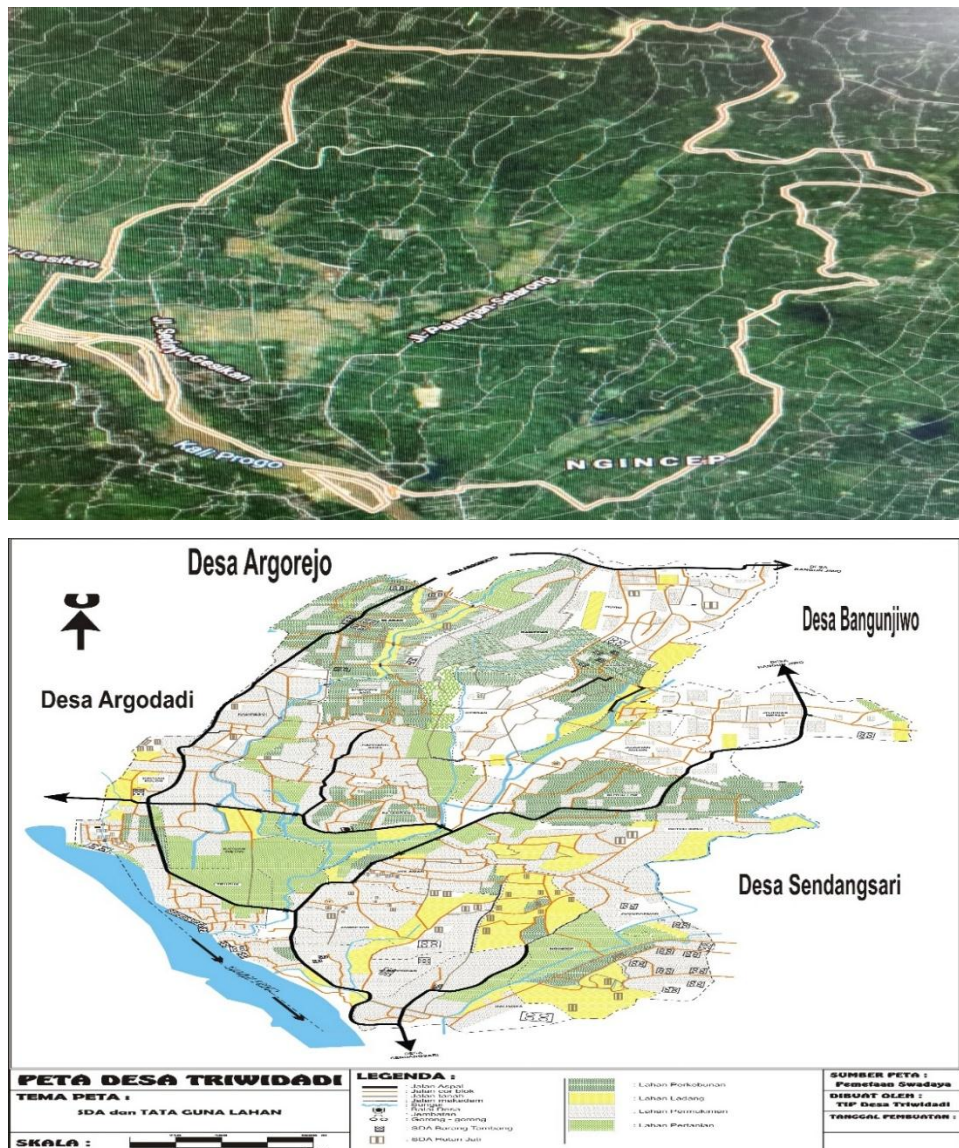
Secara geografis, wilayah Kalurahan Triwidadi memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, secara umum kondisi tanah di Triwidadi tergolong subur sehingga dimungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Namun, masing-masing Pedukuhan memiliki potensi alam yang berbeda karena wilayah Triwidadi memiliki bentang alam yang terdiri dari pegunungan/perbukitan, dan dataran rendah. Di beberapa pedukuhan seperti Guwo, Nanggul, Jojoran Wetan, Jojoran Kulon, Kersan, Gampeng, Kadireso, Blabak, Sabrang Lor, Sabrang Kidul, Polaman, Butuh Lor, Butuh Kidul, Ngincep, Jogonandan, Jambean sebagian besar wilayahnya adalah perbukitan dengan kondisi tanah liat dan berbatu kapur jadi potensial untuk pengengan hutan rakyat, tanaman hortikultura, perkebunan, tanam pangan local bawah tegakan, tanaman polowijo, peternakan serta pengengan wisata alam seperti outbond dan camping ground. Sementara di Pedukuhan Kalisoko, Plambongan, Trucuk, Kayuhan Kulon, Kayuhan Wetan, Pajangan yang cenderung wilayah perbukitannya sedikit berpotensi untuk pengengan tanaman pangan serta kawasan perdagangan dan jasa. Bahkan tiga wilayah Pedukuhan Kayuhan Kulon, Trucuk dan Plambongan dilintasi aliran Sungai Progo yang potensi sebagai sumber daya air pertanian, perikanan, serta pengengan wisata air dan kuliner.

Hal tersebut tentunya sangat potensial untuk mendukung ketersediaan pangan di wilayah Triwidadi dan sektor usaha lain seperti kerajinan, industri rumah tangga, serta sektor produksi lainnya guna menunjang untuk kebutuhan hidup bagi masyarakat di Kalurahan Triwidadi. Disisi lain ada potensi permasalahan terkait kebencanaan seperti tanah longsor dan kekurangan air bersih di daerah perbukitan selain itu ada pergeseran pemanfaatan lahan sebagai daerah tangkapan air dan hutan rakyat beralih fungsi pemanfaatannya. Ditinjau dari segi demografi pertahan penduduk yang setiap tahun meningkat tentunya akan terjadi suatu perubahan jumlah penduduk yang produktif dan tidak produktif. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif perlu disikapi dengan membuat kebijakan yang tepat terkait upaya untuk menyiapkan kualitas angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja, serta menyiapkan dukungan sarana dan prasarana. Sementara untuk mensikapi pertahan penduduk yang tidak produktif tentunya dibutuhkan suatu layanan bagi usia lanjut salah satu contohnya adalah kesehatan.

Secara Geografi Kalurahan Triwidadi terletak di -7.861461, 110.268158. Secara geografis berada di sisi barat Kabupaten Bantul dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Argomulyo, dan Argorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Sendangsari, sebelah barat dengan Kalurahan Argodadi dan sebagian berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kulon Progo, Sebelah

timur berbatasan dengan Kalurahan Bangunjiwo dan Sebagian Kalurahan Sendangsari.

Gambar 2. 1 Wilayah Geografi Kalurahan Triwidadi



Sumber: Pemetaan Potensi dan Permasalahan Tahun 2011

C. Secara Tepografi

Kalurahan Triwidadi berada di ketinggian antara 60 s/d 160 dari permukaan laut. Wilayah Kalurahan Triwidadi hampir 80% merupakan daerah perbukitan dengan bentang alam lereng bukit, punggung bukit, leh dan dataran dengan suhu rata-rata antara 19°C s/d 32°C dengan tingkat kelemban antara 55% s/d 85% dan kecepatan angin rata rata 8Km/Jam s/d 20Km/Jam Di leh antara bukit dengan bukit berpotensi mengalir sumber mata air dan bentang dataran leh sebagai lahan pertanian tanaman pangan. Kalurahan Triwidadi juga memiliki berbagai ekosistem dan habitat satwa liar hutan dan satwa air walaupun akhir akhir ini mulai pengurangan habitat satwa karena perburuan dan migrasi. Keberadaan Kalurahan Triwidadi dengan topografi dan kondisi alamnya yang unik memiliki beberapa manfaat antara lain:

1. Potensi pertanian yang subur di dataran leh
2. Sumber mata air yang dapat dimanfaatkan
3. Parawisata alam yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal
4. Penguatan ekonomi lokal yang berbasis pada pertanian, pariwisata, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

D. Secara Geologi

Struktur tanah di wilayah Kalurahan Triwidadi terdiri wilayah dengan tanah kapur berbatu dan padas, tanah liat berwarna hitam dengan lapisan kerikil, tanah liat berwarna coklat, serta tanah coklat berpasir. Secara umum tanah di Kalurahan Triwidadi tergolong subur untuk ditanami berbagai tanaman pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman hutan. Bahan tang

yang ada di Kalurahan Triwidadi batu kapur, batu hitam, dan pasir. Manfaat struktur tanah dan bahan tang di Kalurahan Triwidadi adalah:

1. Tanah yang subur memungkinkan pengengan pertanian, perkebunan, dan tanaman yang produktif.
2. Bahan tang seperti bantu kapur, batu hitam, dan pasir dimanfaatkan untuk kontruksi, industry dan kegiatan ekonomi lain.

E. Kondisi Sosial Politik

Secara umum peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum Lurah, Bupati, Legislatif, Presiden tingkat kehadiran pemungutan suara cukup baik kehadiran mencapai 80% s/d 87% serta jumlah suara tidak sah tergolong rendah antara 2 s/d 5% tentunya ini menunjukan semangat masyarakat dalam upaya turut mensukseskan penganan Desa. Jumlah ketidakhadiran dalam penyelenggaraan pemilihan suara sebagian besar disebabkan karena pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebagian berada di luar daerah, sakit, Jompo, serta memang kadang kala ada orang yang terdaftar dalam DPT saat penyengaraan pemumungutan suara telah meninggal dunia namun ada juga yang telah pindah penduduk namun masih terdaftar. Sementara ditinjau dari sisi pelaksanaan regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagian besar taat hokum serta memahami tujuan dari peraturan perundang-undangan. Manfaat dari peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum di Kalurahan Triwidadi

1. Meningkatkan legitimasi pemerintah dan penganan desa.

2. Menunjukkan semangat masyarakat dalam mensukseskan pengunan dan demokrasi dan lain-lain.

Sejak berdirinya Kalurahan Triwidadi pada Tahun 1946 kewilayaan Kalurahan Triwidadi memiliki 22 Padukuhan yang terdiri dari 106 RT dengan luas wiliyah 11,8945 Ha.

Padukuhan Kalurahan Triwidadi meliputi:

Tabel 2. 1 Padukuhan Kalurahan Triwidadi

No	Padukuhan	Jumlah RT
1.	Padukuhan Guwo	4 RT
2.	Padukuhan Jojoran Wetan	4 RT
3.	Padukuhan Jojoran Kulon	8 RT
4.	Padukuhan Nanggul	4 RT
5.	Padukuhan Kersan	4 RT
6.	Padukuhan Gampeng	4 RT
7.	Padukuhan Sabrang Lor	3 RT
8.	Padukuhan Sabrang Kidul	4 RT
9.	Padukuhan Pajangan	6 RT
10.	Padukuhan Blabak	3 RT
11.	Padukuhan Kadireso	8 RT
12.	Padukuhan Polaman	4 RT
13.	Padukuhan Butuh Lor	4 RT
14.	Padukuhan Butuh Kidul	4 RT
15.	Padukuhan Jagonandan	4 RT
16.	Padakuhan Ngincep	6 RT
17.	Padukuhan kalisoko	6 RT
18.	Padukuhan Jambean	7 RT
19.	Padukuhan Kayuhan Wetan	4 RT
20.	Padukuhan Kayuhan Kulon	5 RT

21.	Padukuhan Plambongan	4 RT
22.	Padukuhan Trucuk	6 RT

F. Kondisi Demografi

1. Jumlah Pendudukan

Pada penelitian ini sesuai dengan data yang diperoleh menunjukkan pada data monografi Kalurahan Triwidadi tahun 2023 yang man berdasarkan jumlah penduduk dengan perinciannya data penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Data Penduduk Kalurahan

No	Pendudukan	Jumlah	Presentase%
1	Laki-Laki	5.537	49,6%
2	Perempuan	5.622	50,4%
	Total	11.159	100%

Sumber: Data Monografi Pendudukan Kalurahan Tahun 2023

Berdasarkan tabel data di atas jumlah penduduk menurut jenis perempuan lebih banyak, yaitu 5.622 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan yaitu 5.537 jiwa. Jadi bisa disimpulkan bahawa jumlah penduduk perempuan di Kalurahan Triwidadi lebih banyak dari jumlah laki-laki.

2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam proses perkengan pola pikir seseorang dapat tumbuh dengan menempuh pendidikan yang paling baik, sehingga semakin majunya pola pikir seseorang itu dapat diharapkan untuk bisa

mentu dan berguna untuk diri sendiri dalam kehidupannya maupun di lingkungan sekitarnya. Dengan mengetahui komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, pemerintah dan lega terkait dapat membuat kebijakan dan program yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat.

Tabel 2. 3 Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase %
1.	Tidak Sekolah	1.983	17,8%
2.	Belum Tamat SD	1.241	11,1%
3.	Tamat SD	2.466	22,1%
4.	Tamat SMP	2.122	19%
5.	Tamat SMA	2.822	25,3%
6.	Tamat DI/DII	45	0,4%
7.	Tamat DIII	136	1,2%
8.	Tamat DIV/S1	323	2,9%
9.	Tamat S2	20	0,2%
10.	Tamat S3	1	0,01%
	Total	11.159	100,01%

Sumber: Profil Kalurahan Triwidadi 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang paling mendominasi adalah tingkat pendidikan SMA sebanyak 2.822 orang. Dengan demikian tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Triwidadi memiliki tingkat pendidikan tamat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan memiliki lega pendidikan lebih baik

dan menyiapkan fasilitas sehingga mudah bagi siswa untuk mengakses dengan baik.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2. 4 Data Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Presentase %
1.	Islam	11.058	99,1%
2.	Kristen	70	0,63%
3.	Khatolik	26	0,23%
4.	Hindu	0	0%
5.	Budha	0	0%
6.	Konghucu	0	0%
7.	Kepercayaan	5	0,04%
	Total	11.159	100%

Sumber: Profil Kalurahan Triwidadi

Berdasarkan tabel diatas penduduk Kalurahan Triwidadi mayoritas beragama Islam, hal ini dibuktikan dengan data penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 11.058 orang. Dan diikuti dengan agama Kristen sebanyak 70 orang, agama Khatolik sebanyak 26 orang, dan agama Kepercayaan 5 orang. Sedangkan agama Hindu, Budha, dan Konghucu tidak ada sama sekali. Maka berdasarkan tabel di atas Kalurahan Triwidadi hanya memeluk 4 agama saja yakni agama Islam, Kristen, Khatolik, dan Kepercayaan.

G. Keadaan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pengunan yaitu dapat dilihat dari kondisi perekonomian yang stabil serta kondisi sosial budaya yang lebih baik dan sebelum proses pengunan melibatkan masyarakat untuk mendorong lancarnya suatu pengunan yang efektif dan efesien karena masyarakat adalah pelaku dalam pengunan. Sehingga dalam posisi ini peran masyarakat sangat penting bagi kelancaran dan keberhasilan program tersebut dan tercapainya tujuan pengunan secara baik dan tepat, dalam rangka usaha pemerintah untuk mengun masyarakat Triwidadi yang berkualitas. Pada dasarnya pemerintahan berkeinginan untuk membuat perubahan pada suatu kondisi tertentu yang lebih bernilai.

Kondisi masyarakat di Kalurahan Triwidadi saat ini ditinjau dari pendapatan keluarga tergolong masuk kategori sedang hingga rendah. perputran perekonomian tertinggi di Kalurahan Triwidadi di wilayah Padukuhan Jagonandan yang pendapatan ekonomi setiap harinya mencapai 750juta s/d 1,2M per hari karena tumbuhnya sektor usaha perternakan ayam petelur. Namun dari jumlah perputaran ekonomi yang besar seperti wilayah Padukuhan Plambongan, Trucuk, dan Kayuhan Kulon didukung untuk tingkat mobilitas lalu lintas masyarakat dari luar Kalurahan Triwidadi sebagai salah satu titik strategis karena dilalui jalan Provinsi, sehingga memicu banyak pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, dan jasa. Hal ini meningkatkan mobilitas masyarakat luar yang melintas daerah tersebut, mewa dampak positif bagi perekonomian lokal. Sementara ditinjau dari pendapatan keluarga dengan mayoritas Kalurahan Triwidadi yang mata pencariannya sebagai

buruh, karyawan, dengan dukungan usaha pertanian. Dengan pendapatan keluarga rata-rata 100 (seratus ribu rupiah) s/d 200 (dua ratus ribu rupiah) perhari dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga yang begitu banyak. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, perlu melakukan peningkatan ketrampilan, dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mampu memiliki kapasitas di dunia kerja agar mampu untuk meningkatkan kualitas dan kualitas produksi yang baik.

H. Kondisi Sosial

Masyarakat Kalurahan Triwidadi sampai sekarang masih cenderung dipengaruhi oleh adat dan warisan leluhur nenek moyang orang Jawa, perjalanan dan perkungan Keraton Yogyakarta dan perkungan masuknya agama Islam ke tanah Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kalurahan Triwidadi memiliki tradisi yang merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Sementara budaya seluruh ciptaan, rasa, dan hasil karya yang tercapai di lingkungan masyarakat. Berasal dari karya masyarakat menghasilkan kebudayaan, teknologi, perbedaan, maupun kebudayaan jasmani yang akan digunakan oleh masyarakat untuk mempergunakan alam sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil juga kekuatan yang dapat diabadikan untuk keperluan manusia.

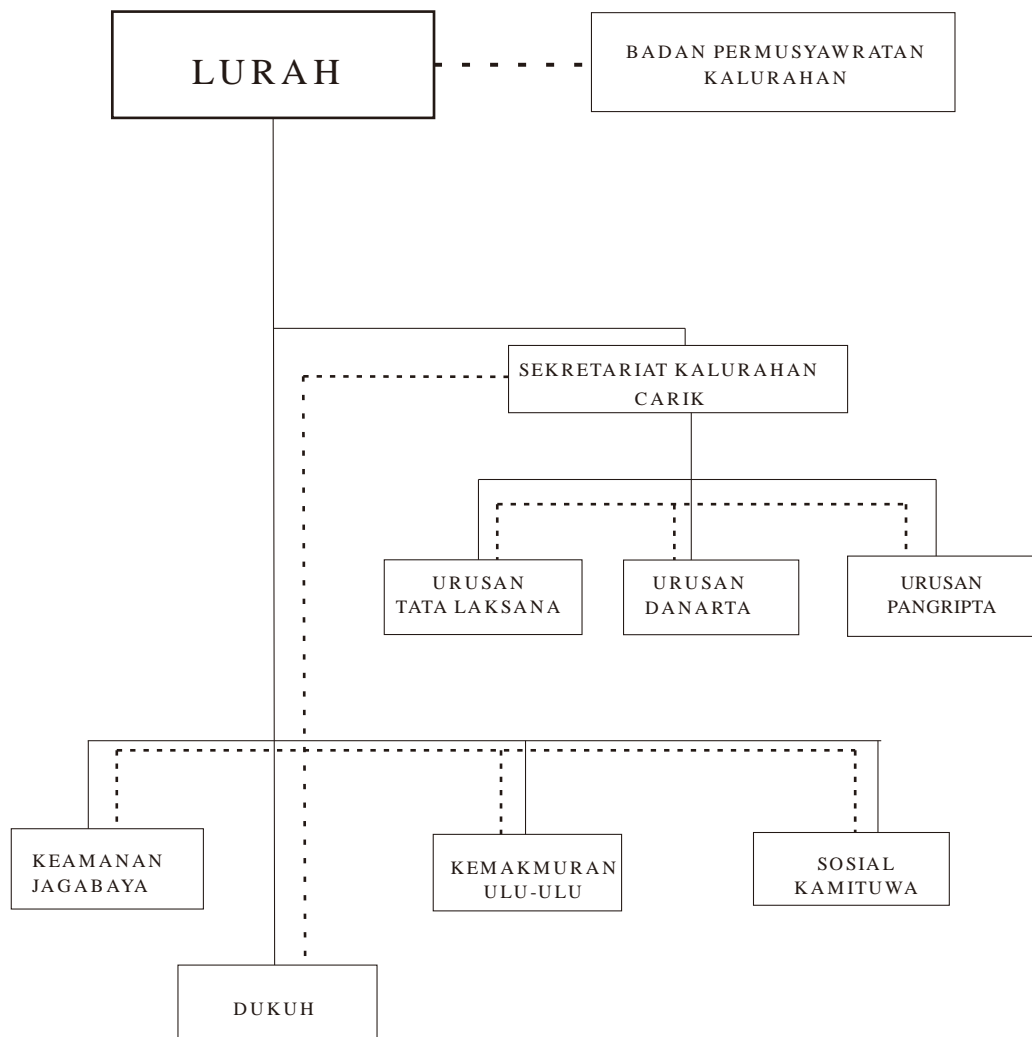
Di Kalurahan Triwidadi masyarakat memiliki berbagai macam adat istiadat, tradisi dan budaya yang berkesan seperti suatu contoh upacara Pernikahan, Tingkeban, Sepasaran Atau Selapanan Bayi, Muludan, Saparan,

Ruwahan, Suran, Merti Desa, dan lain-lain. Selain itu dalam budaya kehidupan di tengah masyarakat juga memunculkan sebuah karya seni yang meliputi, kerajinan, pertunjukan, gar, arsitektur, dan lain sebagainya yang tentunya semua itu memberikan efek kebersamaan, stabilitas psikologis masyarakat, ekonomi, dan identitas suatu wilayah. Di bagian sektor pangan juga ada pengengan kuliner dan tanaman pangan lokal sesuai karakteristik alam suatu wilayah.

I. Pemerintah Kalurahan Triwidadi

Kalurahan triwidadi, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Slamet Riyanto selaku Lurah dan dibantu oleh kepala Dusun/Dukuh. Adapun struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi yakni:

Gambar 2. 2 Struktur Pemerintahan Kalurahan Triwidadi



Sumber: Profil Kalurahan Triwidadi

Pada gambar 2.2 di atas merupakan struktur Pemerintah Kalurahan Triwidadi, struktur tersebut kita bisa tahu tentang tugas, fungsi, dan hubungan kerja yang ada di Kalurahan Triwidadi. Struktur di atas menunjukkan bahwa struktur organisasi Kalurahan Triwidadi sudah membuat dan bekerja dengan baik.

Tabel 2. 5 Perangkat Pemerintahan Kalurahan Triwidadi

No	Nama	Jabatan
1	Slamet Riyanto	Lurah

2	Anita Yulia Fatmawati, Amd	Carik
3	Giyanti, S. Pd	Kasi Jagabaya
4	Widi Astuti	Kasi Kamituwa
5	Mulyadi	Kasi Ulu-Ulu
6	Leli Yuliati	Kaur Danarta
7	Sarwedi	Kaur Pangripta
8	Muhlis Huda Subekti	Kaur Tatalaksana
9	Mukiyo	Dukuh Guwo
10	Waluyo	Dukuh Gampeng
11	Marjiman	Dukuh Kulon
12	Tumiyo	Dukuh Wetan
13	Endung Dasuki	Dukuh Blabak
14	Suyadi	Dukuh Kadireso
15	Sapardi	Dukuh Sabrang Lor
16	Pardi	Dukuh Sabrang Kidul
17	Wakimin	Dukuh Nanggul
18	Giyono	Dukuh Kersan
19	Budiyanto	Dukuh Pajangan
20	Warsiyo	Dukuh Butuh Lor
21	Tri Handayani	Dukuh Butuh Kidul
22	Sudadi	Dukuh Kayuhan Kulon
23	Wajiyono	Dukuh Kayuhan Wetan
24	Sutrajan, Amd	Dukuh Polaman
25	Hendi	Dukuh Jambean
26	Subiyana	Dukuh Ngincep
27	Saronto	Dukuh Jagonandan
28	Siyem	Dukuh Kalisoko
29	Sarawedi	Dukuh Plambongan
30	Dwi Janari	Dukuh Trucuk

J. Lega-Lega Kalurahan Triwidadi

1. Badan Musyawaratan Kalurahan Triwidadi

Badan Musyawaratan Kalurahan Triwidadi adalah lega perwakilan masyarakat di tingkat Kalurahan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Triwidadi. Bamuskal Kalurahan Triwidadi memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, dan akuntabel di tingkat Kalurahan. Melalui fungsi-fungsi tersebut, Bamuskal berkontribusi dalam penguatan pemberdayaan masyarakat kalurahan triwidadi. Berikut tabel struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Triwidadi:

Tabel 2. 6 Struktur Badan Musyawaratan Kalurahan

No	Nama	Jabatan
1	Ruswanto	Ketua
2	Hermawan, S.Pd	Wakil Ketua
3	Risky Dyah Ari Mufti, S.Pd	Sekertaris
4	Triyanto Seputro, S.Pd	Anggota
5	Suparjan, ST	Anggota
6	Mujari	Anggota
7	Dwi Yanto	Anggota

Sumber: Profil Kalurahan Triwidadi

Tabel di atas dapat diketahui bahwa bahwa Bamuskal berperan penting dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan di tingkat kalurahan. Bamuskal juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili.

K. Sarana dan Prasarana Kalurahan

Kalurahan Triwidadi memiliki berbagai fungsi saran dan prasarana yang mendukung kegiatan masyarakat, baik yang formal maupun nonformal. Beberapa diantaranya meliputi:

1. Gedung Pemerintahan

Gedung pemerintahan merupakan pusat administrasi dan pelayanan publik bagi masyarakat. Gedung ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan Pemerintah Kalurahan Triwidadi, seperti rapat, pelayanan administrasi kependudukan, serta kegiatan koordinasi antar lembaga kemasyarakatan. Gedung ini didesain agar mampu mendukung kegiatan formal dan nonformal, dengan dilengkapi ruangan kerja pamong, aula serbaguna, dan fasilitas pendukung lainnya. Keberadaan gedung pemerintahan ini sangat penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Kalurahan Triwidadi terdiri dari berbagai jenjang pendidikan formal, mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keberadaan lembaga pendidikan ini sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalurahan. Pendidikan tidak hanya berperan sebagai tempat belajar dan mengajar, tetapi juga menjadi pusat pembinaan karakter dan pengendalian potensi generasi muda. Beberapa sekolah dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, serta ruang kegiatan ekstrakurikuler, sehingga siswa dapat

belajar secara optimal. Dengan adanya sarana pendidikan yang memadai, Kalurahan Triwidadi diharapkan mampu mencetak generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

3. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Kalurahan Triwidadi berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang tersedia meliputi Puskesmas pentu (Pustu), Posyandu, dan polindes yang tersebar di beberapa padukuhan. Sarana ini didukung oleh tenaga kesehatan seperti bidan desa, kader kesehatan, serta petugas medis yang siap melayani masyarakat.

4. Sarana Beribadah

Sarana beribadah merupakan tempat untuk kegiatan beribadah dan keagamaan. Secara keseluruhan di Kalurahan Triwidadi sebagian besar menganut agama Islam, oleh karena itu di beberapa padukuhan dibangun masjid, mushola, dan tempat ibadah lainnya yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan.

5. Alun-Alun Triwidadi

Lapangan publik yang dikengkan menjadi ruang rekreasi, olahraga, dan titik evakuasi darurat. Alun-alun Triwidadi ini telah mengalami revitalisasi untuk meningkatkan fungsi dan estetika ruang publik. Alun-alun ini menyediakan ruang terbuka yang dapat digunakan untuk berbagi kegiatan, seperti olahraga, acara budaya, dan kegiatan sosial. Alun-alun

juga dilengkapi dengan fasilitas publik seperti lapak pedagang, dan memiliki desain yang estetis dan menarik, sehingga dapat menjadi ikon Kalurahan Triwidadi. Dengan adanya alun-alun Triwidadi, masyarakat dapat memiliki ruang publik yang nyaman dan fungsional untuk berbagai kegiatan. Alun-alun ini juga dapat menjadi symbol identitas kalurahan triwidadi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

6. Lapak PKL

Di sebelah barat alun-alun triwidadi, terdapat lapak-lapak yang disewakan untuk para pedagang yang tergabung dalam peguyuban PKL Triwidadi. Lapak PKL adalah fasilitas yang disediakan untuk pedagang kaki lima di kalurahan triwidadi. Lapak ini dapat digunakan oleh pedagang untuk menjual berbagai jenis barang, seperti makanan, minuman, dan souvenir. Dengan adanya lapak PKL, pedagang kaki lima dapat memiliki tempat yang lebih nyaman dan teratur untuk berjualan, sehingga dapat meningkatkan pendapatn dan kualitas hidup mereka.

7. Sarana Pengunan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP):

a. BKB (Bina Keluarga Balita)

Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola pengasuhan yang tepat bagi anak usia balita, guna mendukung tumbuh keng anak secara optimal, baik secara fisik maupun mental.

b. BKR (Bina Keluarga Remaja)

Sarana pembinaan keluarga yang memiliki remaja, dengan fokus pada penanaman nilai-nilai kehidupan, pendidikan, karakter, dan pencegahan perilaku yang beresiko pada remaja.

c. BKL (Bina Keluarga Lansia)

Program ini mendukung keluarga yang memiliki lansia melalui pembinaan kesehatan, psikologis, serta peningkatan peran lansia dalam kehidupan secara sosial dan keluarga.

d. UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)

Merupakan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga akseptor KB dengan memberikan pelatihan dan dukungan usaha kecil guna meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.

e. Sekertariat KKB

Sekertariat ini menjadi pusat koordinasi berbagai kegiatan kampung KB (kependudukan dan keluarga berencana), termasuk pengelolaan data dan pelaksanaan program berbasis keluarga.

f. Rumah Data Kependudukan Kampung KB

Sarana ini menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini sebagai dasar perencanaan dan evaluasi berbagai program pengunan keluarga dan masyarakat di tingkat padukuhan.

8. Saran Budaya

Kalurahan Triwidadi memiliki berbagai sarana budaya yang digunakan sebagai tempat pelestarian, pengenga, dan ekspresi budaya lokal masyarakat. Sarana budaya tersebut antara lain berupa sanggar seni, balai budaya, dan tempat latihan kesenian tradisional seperti karawitan, tari dan wayang. Kegiatan seni dan budaya rutin dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa, sebagai upaya untuk menjaga warisan budaya lokal. Selain itu, sarana budaya ini juga menjadi media edukasi dan hiburan, serta berperan dalam memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya mereka sendiri. Dengan adanya sarana budaya yang aktif dan produktif, Kalurahan Triwidadi mampu menjaga ruang kreativitas yang mendukung keberlanjutan nilai-nilai tradisi dan mempererat hubungan sosial antar warga.

9. UMKM Kalurahan

Tabel 2. 7 Data Pelaku UMKM dan Jenis Usaha

No	Nama	Jenis Usaha	Alamat
1	Ruliyah	Usaha Kuliner	Blabak
2	Roimah	Warung	Kadireso
3	Wakilah	Makanan Kecil	Sabrang Lor
4	Endang Naning	Warung	Kayuhan Wetan
5	Sarjilah	Warung	Blabak
6	Tumini	Usaha Kuliner	Blabak
7	Mukinem	Warung	Sabrang Lor
8	Ginah Wiyanti	Bakul Tempe	Sabrang Lor
9	Waljinah	Warung	Ngincep
10	Ngadinem	Angkringan	Pajangan

11	Yatinem	Catering	Ngincep
12	Mujinem	Bakul Tempe	Sabrang Lor
13	Boniyem	Gula Jawa	Butuh Lor
14	Sosmawati	Warung	Pajangan
15	Kartinah	Bakul Tempe	Kayuhan Wetan
16	Romsi	Angkringan	Kayuhan Wetan
17	Ngatinem	Warung Makan	Kayuhan Wetan
18	Poniyem	Usaha Kuliner	Jambean
19	Astutik	Emping Garut dan Gula Jawa	Ngincep
20	Suryanti	Angkringan	Trucuk
21	Sukinem	Angkringan	Pajangan
22	Mijem	Jajanan Pasar	Sabrang Lor
23	Mujirah	Bakul Sengsek	Sabrang
24	Sumini	Warung	Sabrang Lor
25	Surani	Warung	Sabrang Lor
26	Ngatinah	Bakul sengsek	Sabrang Lor
27	Kartilah	Emping Garut	Ngincep
28	Mumung Triana	Menjahit	Plambongan
29	Sulika	Makanan Kecil	Polaman
30	Radilah	Emping Garut	Ngincep

Sumber: Data UMKM Kalurahan Triwidadi, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat di Kalurahan Triwidadi yang berprofesi sebagai pelaku UMKM. Terdapat sekitar 30-an pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi yang aktif dan terdapat pula pelaku UMKM yang aktif pada bidang makanan, usaha kuliner, pengerajinan batik dan lain-lain. 1) di bidang makanan dapat dikelompokkan dalam produk berdasarkan makanan yang yang ditawarkan

seperti makanan siap saji contohnya, nasi goreng, bakso, mie goreng, kalau untuk makanan ringan dan cemilan contohnya, kripik ubi, kripik pisang, makanan tradisional itu seperti, gudek, bakpia, kue lapis. Ada juga jasa catering yang melayani pesanan makanan untuk acara atau hajatan. 2) Kerajinan produk lokal dibagi menjadi dua yaitu, produk lokal bagian kuliner seperti emping garut, gula jawa, emping melinjo, tempe. Sedangkan kerajinan tangan itu seperti, kerajinan batik merupakan seni tradisional yang terbuat dari kain bermotif dengan tekniknya agar menghasilkan barang yang bagus seperti, baju, tas, topi, dompet.

Akan tetapi dalam menjalankan usahanya, pelaku UMKM yang aktif dibidang makanan, usaha kuliner, dan pengerajinan tangan menghadapi beberapa kendala ataupun hambatan dalam proses untuk mengembangkan usaha tersebut salah satunya seperti tidak tersedianya alat untuk produksi ataupun wadah untuk pemasaran sehingga bagi para pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya untuk membuat produk-produk mereka dan susah untuk memasarkan hasil produk usaha mereka (Tambunan, 2013).

Hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM tersebut dapat diketahui melalui berbagai metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian maupun pengamatan lapangan. Informasi mengenai kendala seperti tidak tersedianya alat produksi maupun wadah pemasaran biasanya diperoleh dari wawancara langsung dengan pelaku UMKM, survei, dan studi literatur terkait yang mengkaji kondisi riil UMKM di

tingkat lokal (Tambunan, 2013). Selain itu, laporan dan evaluasi dari pemerintah kalurahan serta diskusi dengan komunitas pelaku UMKM juga menjadi sumber utama yang mengungkapkan permasalahan nyata yang dihadapi.

Melalui mekanisme tersebut, dapat terlihat bahwa meskipun pemerintah kalurahan Triwidadi sudah memberikan fasilitasi, bentuk dukungan yang diberikan belum sepenuhnya mampu mengatasi kendala-kendala tersebut secara tuntas. Oleh sebab itu, data dan informasi yang valid dari pelaku UMKM dan hasil evaluasi internal pemerintah kalurahan menjadi landasan penting untuk merancang langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam mendukung pengangan UMKM di wilayah tersebut.

Dalam usaha pengangan UMKM yang ada di Kalurahan Triwidadi dari Pemerintah Kalurahan sudah memfasilitasi untuk para pelaku UMKM tetapi bentuk fasilitasi yang diberikan dari pihak kalurahan belum cukup untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Maka dari pihak Kalurahan Triwidadi berusaha untuk mengatasi masalah tersebut agar dapat mentu para pelaku UMKM dalam perkengan usaha yang dijalankan mereka yang tentunya berdampak pada peningkatan perekonomian yang ada di Kalurahan Triwidadi.

BAB III

ANALISIS DATA

A. Bimbingan Pemerintah Kalurahan dalam Pengengan UMKM di Bidang Produksi

Pemerintah Kalurahan memiliki peran dalam memberikan bimbingan untuk pengengan di bidang produksi kepada para pelaku UMKM dalam mengengkan usaha di bidang produksi. Bimbingan ini dapat dilakukan melalui kegiatan pendampingan yang bersifat teknis maupun manajerial, seperti pelatihan untuk proses produksi yang efesien, penggunaan bahan baku yang berkualitas, serta pengenalan terhadap alat produksi yang lebih modern. Selain itu, pemerintah kalurahan juga dapat menggandeng dinas terkait atau tenaga ahli untuk memberikan arahan langsung kepada pelaku UMKM dalam mengelola proses produksi secara efektif. Dalam hal produksi pemerintah kalurahan juga dapat menyediakan pelatihan atau bimbingan terkait dengan proses peningkatan kualitas produk. Bimbingan ini berupa cara-cara untuk meningkatkan hasil produksi, dan penggunaan teknologi yang baik. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksinya, menjaga konsistensi kualits, serta memenuhi permintaan pasar secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu) terkait Bimbingan Pemerintah Kalurahan dalam Pengengan UMKM di Bidang Produksi, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau untuk sekarang Pemerintah Kalurahan memberikan pembekalan untuk bimbingan atau pelatihan kepada pelaku UMKM untuk pengangan di bidang produksi, itu setiap tahun kita adakan baik penganggaran desa ataupun anggaran arahan yang kita Pekerjasam denga para dewan melalui daerah, jadi biasanya kita tiap tahun dan untuk kali kita juga akan mmeberikan bimbingan atau pelatihanya ada wadahnya desa wisata untuk mendukung dari empat pilar antar budaya preneur atau UMKM untuk mendukung, biasanya nanti untuk UMKM di provinsi kita rutin untuk diberikan fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM, sama kalau yang di Bantul itu Dinas Tenaga Kerja yang mana ada Balai Latihan Kerja (BLK) kita ajukan lewat dana Akun Indikatif Kalurahan, kita ajukan nanti acc tahun berikutnya dilaksanakan untk bimbingan dan pelatihan”.(wawancara pada tanggal 9 April 2025)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dengan Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu), peneliti dapat menganalisis bahwa pemerintah kalurahan secara aktif memberikan pembekalan berupa bimbingan atau pelatihan kepada pelaku UMKM dalam rangka pengangan usaha di bidang produksi. Program ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan didukung melalui penganggaran dari dana desa maupun arahan dari dewan daerah. Pelatihan dan bimbingan ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga dilaksanakan dalam wadah yang lebih luas, seperti desa wisata. Desa wisata dimanfaatkan sebagai media pengangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan berbasis budaya, serta mendukung pilar-pilar pungan desa. Pemerintah kalurahan juga bekerja sama dengan lega di tingkat provinsi, seperti dinas koperasi dan UMKM serta dinas tenaga kerja. Salah satu bentuk nyata kerjasama ini adalah dengan mengajukan program pelatihan melalui balai latihan kerja (BLK), menggunakan dan dari akun indikatif kalurahan. Setiap tahun, usaha program diajukan agar dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya, sehingga kegiatan bimbingan dan pelatihan dapat berjalan berkelanjutan. Dengan adanya bimbingan dan

pelatihan yang terstruktur serta kerjasama lintas lega, pelaku UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk mereka.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Mulyadi selaku Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu), berikut hasil wawancaranya:

“Ada juga keterbatasan fasilitasi dalam pengeng UMKM di bidang produksi itu , itu biasanya kita bisa memberikan pembekalan untuk keterbatasan produksi itu biasanya terkait dengan keterbatasan modal juga , itu kerja sama dengan orang Bank untuk Bank yang kita kerja sama itu Bank Bank Pengunan Daerah (DPD) itu juga memberikan bantuan berupa pinjaman untuk para pelaku UMKM, lalu kalau untuk sumber produk ataupun produk utama lokal ya itu terbatasnya lokal, kalau itu ngga lupa dikasih informasi kalurahan terkait bahan baku yang lebih tersedia dan harganya aman seperti itu, dan kalau untuk mendapatkan hasil produk yang berkualitas itu biasanya kita bekerjasama dengan dinas terkait untuk memberikan penyuluhan dan fasilitasi biasanya untuk kemarin-kemarin cenderung di UMKM pada awalnya itu masih terkait cita rasa itu masalah itu seperti peking, warna, dan lain-lain seperti itu ”.(wawancara pada tanggal 9 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu), peneliti dapat menganalisis bahwa dalam pengengan UMKM di bidang produksi, pemerintah kalurahan masih menghadapi sejumlah keterbatasan dseperti fasilitasi. Salah satu keterbatasan adalah terbatasnya kemampuan kalurahan dalam memberikan pembekalan atau pelatihan karena keterbatasan modal. Oleh karena itu, pemerintah kalurahan berupaya mengatasi hal tersebut melalui kerjasam dengan pihak Bank BPD untuk menyediakan bantuan pinjaman kepada pelaku UMKM. Selain itu, Pamong Kalurahan juga menyampaikan bahwa untuk mendukung produksi utama berbasis potensi lokal, pemerintah kalurahan memberikan informasi mengenal bahan baku,

harga pasar, serta melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar UMKM dapat memperoleh produk yang lebih berkualitas untuk peningkatan kualitas cita rasa, warna, dan pengemasan produk.

Hal serupa juga yang disampaikan oleh Bapak Mulyadi selaku Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu), berikut hasil wawancaranya:

“Kalau dari Kalurahan memfasilitasi sesuai kemampuan anggaran yang ada, yang pertama itu pendataan dan memberikan informasi terkait pengurusan NIB (Nomor Induk Usaha) lebih dari koperasi dan UMKM diharapkan NIB itu nanti bisa dimanfaatkan terkait dengan totalitas usahanya. Yang kedua juga memfasilitasi terkait dengan memberikan momen ataupun waktu untuk dagangannya di exspo kita libatkan UMKM budaya mungkin dari kesenian, dan lain-lain untuk bisa saling bekerja sama. Dalam kita menyelenggarakan kegiatan kesenian para pelaku UMKM bisa mempromosikan setiap produk-produknya di lokasinya. Yang ketiga kita juga memfasilitasi dengan menginformasikan jadwal-jadwal pameran bila mana mau diakses yang di luar Kalurahan Triwidadi, untuk informasinya kami bisa lewat media online maupun offline. Kalurahan juga memfasilitasi dengan penguasaan ruko dan lapak lokasinya di Alun-Alun Kalurahan Triwidadi, itu ada ruko dan lapak untuk para pelaku UMKM bila mau berdagang di Alun-Alun Kalurahan Triwidadi dengan sistem pengelolaan yang sudah diserahkan ke bidang yang ditunjuk oleh Kalurahan. Dan saat ini kita juga mengajukan melalui dan keistimewaan tahun pertama 2025 itu rencananya untuk dipake sebagai permodalan kegiatan exspo dan lainnya nanti digunakan”.*(wawancara pada tanggal 9 April 2025)*

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa Pemerintah Kalurahan memfasilitasi administrasi melalui NIB (Nomor Induk Berusaha). Kalurahan juga berupaya memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM, khususnya yang tergabung dalam koperasi, dengan mentu proses pengurusan NIB. Diharapkan dengan memiliki NIB, pelaku usaha bisa menjalankan usaha secara legal dan lebih maksimal, serta mendapatkan akses lebih luas terhadap program pemerintahan atau pembiayaan. Kedua,

penyediaan waktu dan momen dalam mempromosikan produk pemerintah kalurahan juga memberikan fasilitas berupa waktu dan momen yang tepat bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan expo atau pameran, baik yang diadakan secara lokal maupun melibatkan unsur budaya dan kesenian. Kegiatan ini membuka peluang promosi yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Ketiga, penyebaran informasi jadwal pameran. Informasi terkait jadwal pameran atau kegiatan promosi disampaikan kepada masyarakat melalui media online dan offline. Ini menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi atau Pemerintahan Kalurahan dan pelaku UMKM. Keempat, penguasaan sarana fisik (Ruko dan Lapak). Kalurahan mengonversi ruko dan lapak di area Alun-Alun Triwidadi sebagai sarana berjualan bagi pelaku UMKM. Sarana ini dikelola oleh bidang yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kalurahan, menunjukkan adanya pengelolaan yang terstruktur dan sistematis. Selain itu juga pemerintah kalurahan membuat pengajuan dana keistimewaan untuk permodalan sebagai bentuk keberlanjutan program, kalurahan juga mengajukan Dana Keistimewaan DIY tahun 2025 yang direncanakan akan digunakan untuk menunjang kegiatan expo dan permodalan UMKM. Hal ini menunjukkan adanya upaya strategi jangka panjang untuk mendukung penguatan ekonomi lokal.

Pemerintah Kalurahan Triwidadi menyediakan anggaran khusus sebagai bentuk fasilitasi dan dukungan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Anggaran tersebut

dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pelaku UMKM, mulai dari bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, penyediaan sarana produksi, hingga kegiatan pemasaran produk. Besaran anggaran yang disediakan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan serta prioritas pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal). Meskipun demikian, anggaran yang tersedia masih terbatas sehingga pemerintah kalurahan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaannya secara tepat sasaran agar memberikan dampak maksimal bagi peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM di Triwidadi.

Tabel 3. 1 Rincian Anggaran UMKM di Kalurahan Triwidadi

Jenis Anggaran	Besaran Anggaran (Rp)	Keterangan
Bantuan Modal Usaha	50.000.000	Dana diberikan secara hibah kepada pelaku UMKM untuk pengembangan usaha.
Pelatihan dan Pendampingan	20.000.000	Biaya pelatihan keterampilan dan pendampingan teknis bagi pelaku UMKM.
Penyediaan Sarana Produksi	15.000.000	Pengadaan alat dan fasilitas produksi bagi UMKM prioritas.
Promosi dan Pemasaran	10.000.000	Dana untuk kegiatan pameran, pemasaran digital, dan pengemasan produk.
Cadangan/Reserves	5.000.000	Dana cadangan untuk kebutuhan tak terduga dan dukungan tambahan.
Total Anggaran	100.000.000	Jumlah total anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan UMKM.

Dari tabel rincian anggaran tersebut, terlihat bahwa alokasi dana terbesar difokuskan pada bantuan modal usaha sebesar Rp50.000.000, yang menjadi prioritas utama untuk mendukung pelaku UMKM dalam memperluas kapasitas produksi dan mengembangkan usahanya. Selanjutnya, pelatihan dan

pendampingan diberikan dana yang signifikan sebesar Rp20.000.000, karena peningkatan keterampilan dan pengetahuan menjadi faktor penting dalam keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyediaan sarana produksi serta promosi dan pemasaran juga mendapatkan perhatian dengan alokasi dana masing-masing Rp15.000.000 dan Rp10.000.000, guna memastikan produk UMKM dapat diproduksi dengan kualitas baik serta dikenal lebih luas oleh konsumen.

Meski anggaran tersebut sudah menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam mendukung UMKM, jumlah dana yang tersedia masih terbilang terbatas dibandingkan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kalurahan untuk mengelola anggaran secara efektif dan berupaya mencari sumber pendanaan tambahan, misalnya dari pemerintah kabupaten, provinsi, atau pihak swasta. Dengan demikian, fasilitasi yang diberikan dapat lebih optimal dalam membantu pelaku UMKM mengatasi hambatan dan berkembang secara berkelanjutan, sehingga berdampak positif pada peningkatan perekonomian lokal di Kalurahan Triwidadi.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Slamet Riyanto selaku Lurah di Kalurahan Triwidadi beliau mengatakan bahwa:

“Untuk melakukan bimbingan dalam pengangan UMKM di bidang produksi Kalurahan melakukan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM karena adanya fasilitas yang diberikan kepada para pelaku UMKM yang sudah mengetahui hal tersebut mulai dari hasil produksi, kemasan yang menarik, dan harga sesuai kualitas produk yang akan dijual”.(wawancara pada tanggal 28 Mei 2025)

Dari hasil wawancara di atas bersama Lurah Kalurahan Triwidadi, Bapak Slamet Riyanto, peneliti dapat menganalisis bahwa Pemerintah Kalurahan turut aktif memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM khususnya dalam bidang produksi. Bimbingan ini diberikan karena adanya fasilitas yang tersedia untuk mendukung proses peningkatan kualitas usaha masyarakat. Pelaku UMKM yang telah memiliki pengetahuan dasar mengenai produksi, diajarkan untuk lebih mengengkan aspek penting seperti kualitas hasil produksi, desain kemasan yang menarik, serta cara untuk penetapan harga yang sesuai dengan nilai dan mutu produk. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek teknis produksi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang mempengaruhi daya jual produk di pasar. Dengan adanya bekal pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas, baik dari segi isi maupun kemasannya, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk diterima di pasar.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Abdurahman selaku LPMKal (Lega Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan) beliau mengatakan bahwa:

“Dari Kalurahan sudah mengadakan pelatihan dan workshop untuk para pelaku UMKM. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM untuk menah pemahaman terkait proses produksi yang baik, dan bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas, lewat pelatihan ini pelaku UMKM bisa lebih baik atau lebih efektif dalam pembuatan produk-produk usaha mereka”.(wawancara pada tanggal 10 April 2025)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa Pemerintah Kalurahan melalui LPMKal aktif menyelenggarakan pelatihan dan

workshop untuk mendukung pengenalan UMKM, khususnya dalam bidang produksi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku UMKM mengenai proses produksi yang baik dan benar. Pelatihan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran teknis, tetapi juga mendorong pelaku UMKM untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Dengan peningkatan pemahaman ini, pelaku usaha diharapkan bisa lebih efektif dan efisien dalam mengelola produksi usahanya, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk di pasar. Dengan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pemberi modal, tetapi juga sebagai pendamping dan mempersiapkan kepastian SDM pelaku UMKM agar lebih siap bersaing melalui peningkatan kualitas produksi.

Gambar 3. 1 Pelatihan dan Workshop UMKM



Dokumen website Kalurahan Triwidadi 10/04/2025

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Kalurahan sudah memberikan pelatihan dan workshop kepada para pelaku UMKM. Pelatihan tersebut meliputi peningkatan ketrampilan produksi, pengenalan produk, serta pelatihan

pemasaran digital. Selain itu, pemerintah kabupaten juga memberikan pendampingan rutin agar pelaku UMKM dapat memahami manajemen usaha secara lebih baik.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Astuti sebagai pelaku UMKM beliau mengatakan:

“Untuk kami pelaku UMKM sering merasa kesulitan karena alat untuk produksi masih terbatas, untuk alat yang ada tapi mungkin belum canggih, jadi kami harus memikirkan lagi bagaimana cara untuk bisa membuat hasil produk usaha kami lebih berkualitas. Kalau untuk saya pribadi bisa dibilang sepuh atau sudah tua, jadi banyak yang menggunakan aplikasi untuk mempromosikan hasil produk usahanya melalui media online, itu saya sendiri agak kesusahan untuk menangkapnya istilahnya masih gagap teknologi, jadi untuk memposting hasil produk saya yang telah diproduksi sendiri biasanya hanya lewat status wa, karena itu saya masih dibilang gagap teknologi ya”.(wawancara pada tanggal 10 April 2025)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa beliau mengungkapkan para pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam proses produksi maupun pemasaran. Salah satu tantangan utama yang disampaikan adalah keterbatasan alat produksi yang belum canggih, sehingga kualitas produk yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknologi produksi menjadi perhatian penting dalam pengangan UMKM. Selain itu, Ibu Astuti juga mengeluh keterbatasan dalam mengakses dan memanfaatkan media digital untuk pemasaran. Sebagai pelaku usaha yang berusia lanjut, beliau mengaku kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi, sehingga pemasaran produk hanya dilakukan melalui status whatsapp dan belum menggunakan platform digital yang lebih luas seperti marketplace atau media sosial secara maksimal. Ini menunjukan bahwa

selain dukungan berupa pelatihan, pemerintah kalurahan atau lega terkait perlu juga memberikan bantuan dalam bentuk peningkatan sarana produksi dan pelatihan digitalisasi agar pelaku UMKM, terutama generasi yang lebih tua, dapat menyesuaikan diri dengan perkengan teknologi. Fasilitasi ini penting untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam aspek produksi dan pemasaran di era digital.

Gambar 3. 2 Mempromosi Produk Di Media Online (Whattshap)



Dokumen peneliti 10/04/2025

Berdasarkan pengamatan peneliti, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam hal penguasaan teknologi digital. Hal ini dilihat dari hasil promosi yang dilakukan oleh pelau UMKM masih sangat sederhana, yaitu hanya melalui status whattshap. Minimnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi seperti media sosial lainnya (Instragram, Facebook dll), marketplace online, maupun aplikasi digital marketing menjadi kendala utama dalam meningkatkan jangkakuan

pemasaran produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan harus memberikan pelatihan penguasaan teknologi digitak kepada para pelaku UMKM agar dapat memaksimalakan potensi usaha mereka.

Hal serupa juga yang disampaikan oleh Ibu Astuti selaku pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi, beliau mengatakan:

“Dari Kalurahan Triwidadi sendiri memfasilitasi kami dengan memberi suatu pendampingan yang kami ikuti dan masukan dalam Desa Preneur. Desa Preneur itu merupakan organisasi yang memimpin UMKM dan mulai kita awal kita usaha dan nanti ada pelatihan-pelatihan seperti marketing online sekarang, dan juga kalau ada pameran-pameran kita juga di libatkan dalam pameran tersebut untuk mempromosikan hasil dari produk-produk kami. Kalau untuk pelatihan dan bimbingan dari Kalurahan sendiri itu biasa dilakukan dalam setahun sekali, kalau memang ada program pelatihan atau pembinaan untuk para pelaku UMKM kami juga di libatkan untuk mengikuti kegiatan tersebut”.(wawancara pada tanggal 10 April 2025)

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Astuti dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Triwidadi memberikan dukungan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pendampingan usaha dan pelatihan. Salah satu adalah dukungan tersebut melalui keikutsertaan dalam program Desa Preneur, yaitu sebuah organisasi yang bertujuan untuk membina dan mengarahkan para pelaku UMKM sejak tahap awal memulai usaha mereka. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, khususnya dalam bidang produksi dan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, pelaku UMKM juga dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan seperti marketing online, serta pameran-pameran sebagai sarana untuk promosi produk-produk mereka ke pasar yang lebih luas.

Peluang ini sangat membantu pelaku UMKM dalam membangun jaringan dan meningkatkan daya saing produknya. Meskipun demikian, program pelatihan dan pembinaan yang hanya dilakukan dalam satu tahun sekali menjadi salah satu catatan penting. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dan langkah awal yang positif dari Pemerintah Kalurahan Triwidadi, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal intensitas dan keberlanjutan program pelatihan dan pembinaan.

Gambar 3. 3 Pendampingan Desa Preuner kepada Pelaku UMKM



Dokumen website Kalurahan Triwidadi 10/04/2025

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Pemerintah Kalurahan Triwidadi telah memfasilitasi pelaku UMKM melalui program pendampingan Desa Preuner. Fasilitas tersebut diwujudkan melalui bentuk pelatihan-pelatihan seperti marketing online, serta keterampilan pengangan usaha.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Isman sebagai pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau untuk bimbingan dari Pemerintah Kalurahan dalam pengenalan UMKM di bidang produksi itu kayanya belum pas karna sekmenya beda, karena untuk kami pelatihanya beda yah pelatihanya, kalau pelatihan dari sisi menejemen itu kita malah dari langsung dinas yang ngundang kami tapi bukan kearah teknis tapi lebih ke manajemennya gitu, kami juga ada hatan atau kendala seperti daya beli tapi kalau produk kami sebenarnya cukup laris ya ini kami taroh di Malioboro mall dan disana minta misalnya batik itu juga minta, tapi karena dia peyarannya lama jadi kita belum bareng lagi gitu, jadi kalau daya beli yang menurun itu cukup mengganggu tapi memang semua sekarang semua UMKM merasakan itu mungkin begitu saja ”.(wawancara pada tanggal 11 April 2025)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Isman sebagai pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam pengenalan UMKM di bidang produksi masih belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan pelaku usaha seperti dirinya. Ia menilai bahwa pelatihan yang diberikan kurang tepat sasaran karena lebih menekankan aspek manajemen, bukan aspek teknis produksi yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesesuaian materi pelatihan dengan karakteristik dan kebutuhan sektor usaha yang berdeda-beda. Selain itu, Bapak Isman juga menyoroti kendala dalam distribusi dan sistem peyaran, khususnya ketika produk mereka dipasarkan melalui mitra seperti pusat perbelanjaan (contohnya Malioboro Mall). Permasalahan yang muncul adalah sistem peyaran yang lat, sehingga mengganggu arus kas pelaku UMKM. Di sisi lain, meskipun produk tergolong laris, penurunan gaya beli konsumen tetap menjadi tantangan yang cukup baik.

Hal serupa juga yang disampaikan oleh Bapak Isman selaku pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi, berikut hasil wawancaranya:

“Fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan kepada para pelaku UMKM hanya berupa pelatihan, bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan. Tetapi kalau untuk pembinaan yang rutin itu memang belum ada tapi kalau fasilitasi dari Kalurahan yang kami terima biasanya diikutkan ke berbagai pameran, dan mempromosikan dalam bentuk video, tapi kami belum tahu untuk mengunggahnya dimana, tetapi kalau untuk usaha sendiri ada media soalnya seperti instagram, facebook, dan lainnya. Kalau untuk mengurus surat ijin usaha itu sangat mudah, karena pelayanan di Kalurahan sangat baik”.(wawancara pada tanggal 11 April 2025)

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Isman dapat diketahui bahwa fasilitasi yang diberikan Pemerintah Kalurahan berupa pelatihan, pembinaan, dan penyuluhan. Namun, menurut Bapak Isman, kegiatan pembinaan tersebut belum dilakukan secara rutin. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat dan langkah fasilitasi, program masih menjadi tantangan. Salah satu bentuk dukungan yang dirasakan adalah keikutsertaan dalam pameran dan promosi, termasuk pembuatan video promise. Hal ini menunjukkan adanya upaya promise dari pihak Kalurahan terhadap produk UMKM, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pemanfaatan hasil promosi tersebut (misalnya mereka belum tahu harus mengunggahnya dimana). Untuk promosi usaha, pelaku UMKM seperti Bapak Isman lebih banyak menggunakan media sosial seperti instagram dan facebook. Ini menunjukkan bahwa inisiatif pribadi pelaku UMKM sudah mulai terbuah, walaupun masih perlu pendampingan teknis dari Pemerintah Kalurahan. Dalam kemudahan pelayanan pemerintahan Kalurahan dalam pengurusan surat izin usaha dinilai sangat baik dan mudah. Ini menandakan adanya perbaikan dalam pelayanan publik dan dukungan administrasi terhadap para pelaku UMKM.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tumini selaku pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk usaha ini saya mandiri kalau untuk fasilitasi pengangan di bidang produksi itu saya dari bahan baku dan lain-lain , jadi saya juga masih punya kendala atau hatan seperti tempat produksi yang belum canggih dan masih belum layak lah , dan saya dsini bisa lihat sendiri saya masih memakai alat-alat yang masih sederhana sehingga waktu untuk produksinya memakan waktu yang lama, dan saya juga menyiapkan bahan baku seadanya ketika bahan baku yang saya perlukan naik, kira-kira seperti itu ”.(wawancara pada tanggal 14 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Tumini selaku pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi peneliti dapat menganalisis bahwa fasilitasi pengangan UMKM di bidang produksi dari pemerintah belum sepenuhnya dirasakan optimal oleh pelaku usaha. Hal ini terlihat dari keterangan Ibu Tumini yang menyampaikan bahwa dalam menjalankan usahanya masih dilakukan secara mandiri, baik dari segi penyediaan bahan baku maupun proses produksi. Kendala yang dihadapi ibu tumini adalah keterbatasan alat produksi yang masih sederhana dan belum canggih, serta tempat produksi yang belum layak. Dan keterbatasan waktu dalam mempersiapkan bahan baku sendiri itu juga menjadi hatan bagi ibu tumini. Keterbatasan ini membuat hasil produksi lebih lat dan kurang efisien.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ariyanti selaku pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi, berikut hasil wawancaranya:

“Pemerintah Kalurahan sudah menyediakan wadah untuk kami para pelaku UMKM seperti bimbingan dan lainnya , tapi balik lagi kepada kami pelaku UMKM untuk kreativitas usahanya kami sendiri, bagaimana cara agar kami bisa menghasilkan produk-produk usahanya itu menjadi lebih baik dan menarik untuk konsumennya suka itu

tergantung dari diri kami sendiri”.(wawancara pada tanggal 13 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ariyanti peneliti dapat menganalisis bahwa Pemerintah Kalurahan telah menyediakan wadah berupa bimbingan dan dukungan dalam rangka pengangan UMKM, khususnya di bidang produksi. Namun, ibu Ariyanti mengatakan bahwa keberhasilan pengangan usaha bergantung pada kreativitas dan inisiatif dari pelaku UMKM sendiri. Meskipun fasilitasi dari pemerintahan sudah tersedia, efektivitasnya sangat ditentukan sejauhmana pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang tersebut. Kreativitas agar mengolah produk lebih menarik dan sesuai dengan selera pasar menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk.

Hal yang serupa juga yang disampaikan Ibu Ruliyah selaku pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau untuk bimbingan dan pelatihan untuk pengangan UMKM di bidang produksi itu Kalurahan Triwidadi memfasilitasi kepada pelaku UMKM melalui bimbingan, pelatihan, dan pembinaan , untuk meningkatkan produksi hasil usaha kami seperti kuliner emping, tempe, gula Jawa, nira kelapa dan lain-lain, tapi kalau untuk pengengannya itu masih kurang e , kami juga masih minimnya marketing offline maupun online, dan untuk standar produknya juga masih kurang, mungkin itu saja ”.(wawancara pada tanggal 13 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Ruliyah peneliti dapat menganalisis bahwa Pemerintah Kalurahan Triwidadi telah memberikan berbagai bentuk fasilitasi dalam pengangan UMKM, terutama di bidang produksi. Bentuk fasilitasi tersebut antara lain berupa bimbingan, pelatihan, dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi

pelaku UMKM, terlebihnya di sektor kuliner tradisional seperti emping, tempe, gula jawa, nira kelapa, dan makanan khas lainnya. Namun masih ada hatan atau kendala dalam pengengan usahanya. Salah satu kendala utama kurangnya pemasaran secara offline dan online dan belum ada standar kualitas produk yang merata.

Gambar 3. 4 Pelatihan Olahan Nira Kelapa



Dokumen website Kalurahan Triwidadi 13/04/2025

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pemerintah kalurahan sudah memberikan bimbingan dan pelatihan untuk bidang produksi kepada para pelaku UMKM melalui beberapa program pelatihan. Salah satunya pelatihan pengolahan Nira Kelapa kepada para pelaku UMKM. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil nira kelapa menjadi produk bernilai jual tinggi, sehingga dapat membuka peluang usaha baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan mendorong potensi lokal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa bimbingan Pemerintah Klaurahan dalam pengengan UMKM di bidang produksi telah berjalan cukup baik, meskipun masih

terdapat beberapa kendala di lapangan. Pemerintah Kalurahan Triwidadi secara aktif memberikan berbagai bentuk bimbingan, pembinaan, pelatihan, kepada para pelaku UMKM, seperti pelatihan peningkatan ketrampilan produksi, pengolahan bahan baku lokal, serta pengenalan teknologi sederhana untuk mendukung proses produksi. Selain itu, pemerintah juga turut memfasilitasi akses kepada para pelaku UMKM terhadap sarana produksi melalui bantuan alat maupun penguatan kelegaan usaha. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa pelaku usaha yang masih belum mampu mengoptimalakan hasil produksi dikarenakan keterbatasan pengetahuan teknologi dan kurangnya pendampingan lanjutan. Secara umum bimbingan yang diberikan pemerintah sudah cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap hasil produksi agar pelaku UMKM dapat lebih mandiri dan berdaya saing.

B. Pembinaan Pemerintah Kalurahan dalam Pengangan UMKM di Bidang Sumber Daya Manusia

Pengangan sumber daya manusia (SDM) bagi pelaku UMKM memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan suatu usaha masyarakat. Pembinaan yang dilakukan seperti pelatihan ketrampilan, pendampingan, serta penyuluhan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM dan mengola usahanya secara baik dan mandiri. Untuk beberapa aspek sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM seperti pengetahuan mengenai manajemen usaha, pemasaran, pengemasan produk, serta pemanfaatan teknologi digital dalam promosi dan penjualan.

Maka dilakukan wawancara bersama Bapak Slamet Riyanto selaku Lurah di Kalurahan Triwidadi, dan berikut hasil wawancaranya:

“Pemerintah Kalurahan melakukan upaya untuk pelaku UMKM dalam bentuk pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM untuk mentu meningkatkan ketrampilan, pemahaman mengenai teknologi, pengemasan produk, pemasaran, dan manajemen usaha untuk menciptakan inovasi baru bagi para pelaku UMKM. Dan kami melibatkan mereka untuk ikutserta dalam gelar pameran-pameran untuk mentu mereka dalam pemasaran melalui pameran tersebut”.(wawancara pada tanggal 28 Mei 2025)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Slamet Riyanto, peneliti dapat menganalisis bahwa terdapat upaya nyata dari Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam mentu pengengan UMKM, khususnya melalui pembinaan dan pendampingan. Pemerintah Kalurahan memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan ketrampilan, pemahaman terhadap teknologi, pengemasan produk, serta manajemen usaha agar mampu menciptakan inovasi baru dalam kegiatan usahanya. Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk mentu pelaku UMKM dalam hal pemasaran dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan pameran agar produk mereka lebih dikenal oleh kalangan masyarakat luas dan berpotensi meningkatkan penjualan.

Gambar 3. 5 Pameran Kuliner Kalurahan Triwidadi



Dokumen website Kalurahan Triwidadi 28/05/2025

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Pemerintah Kalurahan Triwidadi turut melibatkan para pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan pameran. Keterlibatan ini bertujuan untuk mentu para pelaku usaha dalam memasarkan produk-produk mereka secara lebih luas kepada masyarakat. Melalui gelar pameran-pameran tersebut, pelaku UMKM mendapatkan kesempatan untuk mengenal produk unggulannya secara langsung, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan daya saing usaha lokal.

Hal yang serupa yang disampaikan juga oleh Bapak Slamet Riyanto selaku Lurah Kalurahan Triwidadi, berikut hasil wawancaranya:

“Beliau mengatakan untuk sekarang kami mengupayakan untuk pelaku UMKM selain memberikan pembinaan, pelatihan, pendampingan dan lain-lain, kami juga sedang mengupayakan untuk meningkatkan skill yang mereka miliki agar bisa diasah terus menerus dan kami juga sedang mentu para pelaku UMKM lewat meningkatkan produk-produk usaha mereka agar lebih banyak dikenal atau diminati oleh masyarakat luar kalurahan triwidadi. Hal ini dapat mentu untuk meningkatkan volue para pelaku UMKM”.(wawancara pada tanggal 28 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama Bapak Slamet Riyanto selaku Lurah Kalurahan Triwidadi, peneliti dapat menganalisis bahwa Pemerintah Kalurahan Triwidadi memiliki komitmen dalam mendukung pengangan pelaku UMKM melalui pendekatan yang menyeluruh. Pemerintahan tidak hanya fokus pada pemberian pembinaan dan pelatihan, tetapi juga secara aktif melakukan pendampingan dengan peningkatan ketrampilan (skill) secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bersifat satu kali turun tangan, melainkan melakukan penguatan secara terus menerus agar pelaku UMKM mampu tumbuh secara mandiri. Selain itu, pemerintah kalurahan juga berupaya mentu dari sisi pemasaran, yakni dengan meningkatkan visibilitas produk-produk UMKM agar lebih dikenal dan diminati masyarakat luas, termasuk masyarakat di luar wilayah Kalurahan Triwidadi.

Hal serupa juga yang disampaikan oleh Bapak Slamet Riyanto selaku Lurah Kalurahan Triwidadi, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk sampai saat ini Pemerintah Kalurahan memfasilitasi kepada para pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Triwidadi, memberikan pelatihan-pelatihan atau pembinaan karena masih banyak para pelaku UMKM yang masih belum terlalu paham mungkin masih dalam tahap memulai usaha. Kegiatan UMKM seperti peningkatan prodak atau kualitas prodak dan memberikan pelatihan untuk sumber daya manusia (SDM) mungkin di keanekaragaman prodaknya itu masih bersifat pelatihan-pelatihan terus juga dalam kegiatan-kegiatan lain, seperti digital marketing, dan juga seperti kegiatan-kegiatan lain, seperti pertemuan untuk memfasilitasi itu ada. Pemerintah kalurahan juga memberikan ijin usaha, atau tempat untuk para pelaku UMKM”.(wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Dari hasil wawancara di atas dengan Bapak Slamet Riyanto selaku Lurah Kalurahan Triwidadi, peneliti dapat menganalisis bahwa Pemerintah

Kalurahan memfasilitasi para pelaku UMKM melalui bentuk pembinaan dan pelatihan. Hal ini dilakukan karena menyoroti pelaku UMKM di wilayah Kalurahan Triwidadi masih berada pada tahap awal dalam menjalankan usaha. Pemerintah Kalurahan memberikan pelatihan yang mencakup peningkatan kualitas produk, pengangan sumber daya manusia (SDM), serta pelatihan digital marketing. Selain itu, pihak kalurahan juga memfasilitasi pelaku UMKM dalam bentuk pertemuan atau forum yang memungkinkan adanya bimbingan dan pendampingan lanjutan. Tidak hanya itu, pemerintah Kalurahan Triwidadi juga turut mentu dalam hal perijinan usaha serta menyediakan tempat untuk pelaku UMKM. Hal ini juga menunjukkan akan kesadaran bahwa pentingnya pengangan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk fasilitas yang diberikan Pemerintahan Kalurahan lebih banyak berfokus pada pengetahuan kapasitas usaha dan perbudayaan pelaku UMKM secara non fisik, sebagai langkah awal dalam mendukung pemngemabangan ekonomi lokal di Kalurahan Triwidadi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu), berikut hasil wawancaranya:

“Kalau untuk pembinaan dalam pengangan sumber daya manusia (SDM) itu ada , karena ada beberapa pelaku UMKM yang masih minim sumber dayanya, seperti ketrampilan pelaku UMKM itu harus ditingkatkan kalau untuk permodalan itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya ada pihak yang memberikan modal usaha agar pelaku UMKM lebih berkeng. Mungkin hal penting itu mereka harus menguasai teknologi seperti media sosial, karena masih banyak pelaku UMKM yang minim dalam sosial media untuk mempromosikan produk usahanya, maka dari itu kita pihak Kalurahan memberikan pelatihan untuk mentu mereka agar mereka mampu menguasai

teknologi mereka meningkat, dan untuk permodalan semakin kuat”.(wawancara pada tanggal 9 April 2025)

Dari hasil wawancara di atas bersama Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu), peneliti dapat menganalisis bahwa pengangan SDM merupakan salah satu aspek penting dalam upaya fasilitasi pemerintah kalurahan terhadap pelaku UMKM. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan ketrampilan dan kapasitas individu yang minim, terutama dalam penguasaan teknologi dan pemanfaatan media sosial. Untuk peningkatan ketrampilan pelaku UMKM, baik dari sisi teknis maupun non teknis. Hal ini bertujuan agar UMKM tidak hanya berkeng secara modal, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkengan zaman, khususnya dalam hal pemasaran digital. Dalam keterbatasan tersebut pemerintah kalurahan berupaya memberikan pelatihan yang mendukung penguasaan teknologi, seperti penggunaan media sosial untuk promosi produk. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing dan memperluas jangkuan pasar mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Anita Yulia Fatmawati selaku Carik Kalurahan Triwidadi, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Triwidadi sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian, seperti usaha milik pribadi atau usaha milik Pemerintah Kalurahan, dari pihak Kalurahan sendiri masih mengakomodir dari beberapa pelaku UMKM yang mempunyai usaha mandiri, yang kemudian memberikan fasilitas warga khususnya bagi para perempuan yang belum mempunyai basic, atau belum mempunyai skill yang baik di situ kami mewadai dan diajarkan bagaimana cara membuat digital marketing itu sendiri seperti apa, dan mungkin itu saja yang saya tau mengenai fasilitasi pengangan UMKM”.(wawancara pada tanggal 9 April 2025)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa pemerintah Kalurahan Triwidadi telah berperan aktif dalam mengakomodir pelaku UMKM diwilayahnya. Pengelompokkan pelaku UMKM menjadi dua jenis, yaitu milik pribadi dan milik pemerintah, menunjukkan bahwa adanya struktur dan klasifikasi usaha yang dikelola dengan baik. Selain itu, pemerintah kalurahan juga memberikan pelatihan khusus kepada para perempuan yang belum memiliki ketrampilan dasar atau skil yang bagus, dengan menyediakan pelatihan seperti digital marketing. Hal ini mencerminkan adanya upaya pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, agar mampu bersaing dan mandiri dalam dunia usaha. Bentuk fasilitasi ini menunjukan bahwa pemerintah kalurahan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial, dengan mendorong peningkatan kapasitas individu melalui pelatihan ketrampilan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdurahman selaku LPMKal di Kalurahan Triwidadi, beliau mengatakan:

“Kami Pemerintah Kalurahan melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM di bidang sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan workshop ya , ada juga kami melakukan sosialisasi dan promosi program pembinaan itu bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan pelaku UMKM, ada juga keterbatasan kurangnya kesadaran dan motivasi dari pelaku UMKM untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan mereka mungkin itu saja ”.(wawancara pada tanggal 10 April 2025)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa pemerintah kalurahan telah menjalankan peran aktif dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) bagi pelaku UMKM. Bentuk pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan

ketrampilan serta pengetahuan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Namun dalam pelaksanaan program ini mempunyai hatan terutaman pada aspek partisipasi dari pelaku UMKM itu sendiri, kurangnya kesadaran dan motivasi dari pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas diri mereka dan pemanfaatannya belum optimal karena belum semua pelaku usaha menyadari pentingnya peningkatan kualitas SDM dalam pengengan usaha.

Hal serupa juga yang disampaikan oleh Bapak Abdurahman selaku LPMKal di Kalurahan Triwidadi:

Kalurahan sebagai wujud kepedulian dan juga penanggung jawab terkait pengengan UMKM, seringkali diadakan pelatihan-pelatihan dan pertemuan rutin terkait pengengan UMKM dan beberapa kali juga selain pelatihan juga diberikan fasilitasi alat-alat untuk pendukung dan wadah untuk para pelaku UMKM di Desa Prima dan Desa Preuner itu kumpulan ibu-ibu yang diwadahi oleh kelegaan di desa prima itu juga selain pelatihan ada guliran modal atau modal bergulir yang disimpan pinjamkan itu dulu program dari pemerintah provinsi tapi kelolanya ada Kalurahan, itu juga ada kemarin dikasih modal 25 juta terus dibuat simpan pinjamkan di Desa prima”.(wawancara pada tanggal 10 April 2025)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisi bahwa pemerintah kalurahan memberikan pelatihan dan pertemuan rutin kepada para pelaku UMKM sebagai upaya peningkatan kapasitas. Kalurahan secara rutin mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pelaku UMKM sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pelatihan ini mencakup aspek pengengan usaha yang sangat relevan untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal. Kalurahan juga memberikan fasilitas seperti alat dan wadah usaha selain pelatihan, kalurahan juga memberikan bantuan berupa alat-alat pendukung kegiatan usaha, yang menunjukkan

perhatian terhadap aspek produksi. Wadah seperti Desa Prima dan Desa Preuner menjadi tempat bagi pelaku UMKM (khususnya ibu-ibu) untuk berkegiatan secara terorganisir. Selain itu juga adanya modal bergulir yang awalnya berasal dari program pemerintah, provinsi, namun kini dikelola oleh kalurahan. Ini menunjukkan kemampuan kelegaan lokal dalam mengelola program keuangan mikro secara berkelanjutan.

Gambar 3. 6 Pertemuan Rutin Desa Prima Kalurahan Triwidadi



Dokumen website Kalurahan Triwidadi 10/04/2025

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pemerintah kalurahan bertanggung jawab terhadap pengengan UMKM. Selain itu, pemerintah kalurahan juga rutin mengadakan berbagai pelatihan yang berkaitan dengan pengengan usaha para pelaku UMKM, khususnya yang tergabung dalam program Desa Prima dan Desa Preuner.

Berdasarkan wawancara dengan oleh Ibu Ruliyah selaku pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau dari saya pribadi itu saya mengetahui bahwa ada program pembinaan seperti sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kalurahan, untuk program tersebut baik untuk meningkatkan ketrampilan dan

pengetahuan saya dalam mengelola usaha, saya juga merasa bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) itu menjadi hatan bagi pengengan usaha saya dan juga para pelaku UMKM lainnya, saya pribadi juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang manajemen dan pemasaran online seperti usaha kuliner saya itu biasanya saya promosi lewat media sosial seperti instagram, status wa, dan lain-lain, karena usaha saya ini usaha mandiri e mungkin itu saja ”.(wawancara pada tanggal 13 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa pelaku UMKM mengetahui adanya program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Program tersebut dinilai positif karena dapat meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan pelaku usaha dalam mengelola usaha mereka, termasuk dalam manajemen pemasaran. Namun ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi kendala utama dalam pengengan usaha, baik bagi dirinya sendiri maupun pelaku UMKM lainnya salah satunya pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam promosi produk usaha mereka.

Gambar 3. 7 Promisi Produk lewat Instagram



Dokumen peneliti 13/04/2025

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pelaku UMKM mulai aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi produk mereka, khususnya di sektor kuliner. Media sosial seperti whatsapp, instagram dan lain-lain sering digunakan oleh pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat yang lebih luas.

Hal serupa juga yang disampaikan oleh Ibu Ruliyah selaku pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau soal fasilitasi pemerintah Kalurahan Triwidadi itu memberikan bantuan berupa alat kemasan produk, stand, dan lain-lain. Tapi untuk pengemasan yang baik dan menarik itu masih kurang, dan untuk pendampingan terhadap para pelaku UMKM itu masih kurang juga, karena pelatihan atau pendampingan yang diberikan oleh kalurahan itu cuman setahun sekali, dan kadang tidak ikutserta dalam kegiatan pelatihan untuk pelaku UMKM mungkin karena ada halangan begitu, jadi serengkali kita lebih mandiri saja, tapi sebenarnya kita ada niat untuk menjalankan usaha-usaha yang telah kita buat seperti usaha kuliner seperti emping melinjo, dan kuliner lainnya mungkin seperti itu dari saya”.(wawancara pada tanggal 13 April 2025)

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Ruliyah dapat diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Triwidadi telah memberikan dukungan dalam bentuk bantuan fisik seperti alat kemasan produk dan stand. Bantuan ini menunjukkan adanya kepedulian pemerintah dalam mendukung pelaku UMKM, khususnya dalam aspek peningkatan tampilan produk secara fisik. Namun pelaku UMKM menyampaikan bahwa dukungan tersebut masih belum optimal, terutama dalam hal pengemasan yang menarik dan pendampingan usaha. Ibu Ruliyah menyoroti bahwa pendampingan dari pemerintah kalurahan masih kurang baik, karena pelatihan dan pembinaan hanya

dilakukan dalam setahun sekali. Selain itu, tidak semua pelaku UMKM dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik kurangnya informasi maupun karena kesibukan menjalankan usah sehari-hari. Pernyataan ini juga mencerminkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih berjalan secara mandiri tanpa bimbingan yang cukup dari pihak Pemerintahan. Hal ini berpotensi menjadi hambatan dalam pengangan usaha, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dukungan dari Pemerintah Kalurahan Triwidadi sudah ada, namun masih perlu ditingkatkan dari segi kualitas pendampingan, kegiatan pelatihan, serta strategi agar seluruh para pelaku UMKM dapat terlibat secara aktif dan merata dalam setiap program yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Astuti selaku pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk saya pribadi kalau soal pembinaan dalam pengangan di bidang sumber daya manusia itu saya pribadi SDMnya sudah sepuh ibaratnya sudah tua jadi untuk menangkap seperti sekarang banyak menggunakan aplikasi, media sosial macam-macam itu agak kesusahan bagi saya istilah masih gagap teknologi padahal saya sering diajarin anak saya untuk mempromosikan jualan usaha kuliner saya tapi bagi saya masih susah, itu menjadi hambatan bagi saya dalam pengangan usaha saya seperti itu ”.(wawancara pada tanggal 10 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa kendala yang dihadapi dalam pengangan usaha adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam hal usia dan kemampuan mengakses teknologi. Ibu Astuti menyampaikan bahwa sebagai pelaku UMKM yang sudah usianya yang lanjut, ia merasakan kesulitan untuk

mengikuti perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang kini menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran. Hal ini membutuhkan pembinaan yang lebih baik lagi untuk kemampuan SDM.

Hal serupa juga yang disampaikan Bapak Isman selaku pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi, berikut hasil wawancaranya:

“Pemerintah Kalurahan memberikan pembinaan terhadap para pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), agar tidak menjadi hambatan bagi pengembangan usahanya dan bisa mendapatkan hasil produk yang lebih baik lagi. Kalau usaha saya sendiri itu desain batik yah maka saya perlu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang desain batik, pemasaran online dan manajemen bisnis”.(wawancara pada tanggal 11 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa pemerintah kalurahan telah memberikan pembinaan kepada para pelaku UMKM, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembinaan ini dianggap penting untuk mencegah keterbatasan SDM menjadi hambatan dalam pengembangan usaha. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan sangat diperlukan agar produk yang dihasilkan bisa memiliki nilai lebih tinggi. Seperti usahanya di bidang desain batik, ia mengakui peningkatan kemampuan dalam hal desain, pemasaran online, serta manajemen bisnis.

Gambar 3. 8 Produk Desain Batik



Dokumen peneliti, 11/04/2025

Berdasarkan pengamatan peneliti juga bahwa hasil dari produk desain batik ini juga dibuat dari motif yang menarik dan mempunyai daya tarik tersendiri dengan desain yang unik dan menyesuaikan tren pasar.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ariyanti sebagai pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi beliau mengatakan:

“Kalau untuk bantuan dari pemerintah kalurahan sendiri itu ada, tetapi bantuan itu tidak diberikan untuk secara keseluruhan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Triwidadi, untuk sampe sekarang memang belum ada apalagi untuk individu atau perorangan, tapi kalau dari segi nonfisik itu ada seperti pelatihan, disini juga biasanya ada acara pameran budaya seperti bazar, dan lain-lain, disitulah kita pelaku UMKM dilibatkan untuk ikutserta dalam pameran tersebut untuk promosi hasil produknya”.(wawancara pada tanggal 13 April 2025)

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa bantuan dari pemerintah Kalurahan Triwidadi kepada pelaku UMKM memang telah diberikan, namun belum merata dan tidak secara individu atau perorangan bagi para pelaku UMKM. Dukungan yang diberikan masih bersifat umum dan bukan kolektif, bukan berbasis kebutuhan spesifik masing-masing pelaku usaha. Ada juga bantuan non fisik, seperti pelatihan dan keikutsertaan dalam pameran-pameran

budaya atau bazar, menjadi salah satu bentuk dukungan yang paling sering diterima oleh para pelaku UMKM. Dalam kegiatan tersebut, para pelaku UMKM dilibatkan sebagai peserta pameran untuk mempromosikan produk mereka ke masyarakat yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan sudah memiliki perhatian terhadap eksistensi UMKM, namun belum sepenuhnya memberikan perhatian secara menyeluruh dan mendalam, terutama untuk pengengan usaha di tingkat individu. Minimnya bantuan fisikmaupun pembinaan dapat menjadi hatan dalam pertumbuhan UMKM secara lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan Trwidadi telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengengan UMKM di bidang sumber daya manusia. Melalui berbagai program seperti pelatihan, workshop, dan penyuluhan, pemerintah kalurahan berupaya meningkatkan ketrampilan, pengetahuan, serta kemampuan manajemen usaha para pelaku UMKM. Program pembinaan ini juga mendoro pemenfaatan media sosial untuk mempromosikan pemasaran produk. Namun demikain, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi kendala seperti rendahnya partisipasi pelaku UMKM, keterbatasan penguasaan teknologi, serta minimnya motivasi belajar terutama pada para pelaku usaha yang berusia lanjut. Oleh karena itu, pembinaan SDM perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang sesuai kebutuhan para pelaku UMKM agar hasil lebih optimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian penelitian dalam pehasan yang dilakukan peneliti dalam Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Triwidadi Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa:

1. Bimbingan Pemerintah Kalurahan dalam Pengengan UMKM di bidang Produksi

Bimbingan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam pengengan UMKM di bidang produksi biasa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan teknis seperti pengemasan produk, peningkatan kualitas, bahan baku, serta penyuluhan yang mengenai standar mutu. Bimbingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hasil produksi pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk-produk mereka yang lebih berkualitas dan memilih daya saing. Fasilitasi dari Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam sarana dan prasarana UMKM diwujudkan melalui penyediaan tempat usaha, rumah kemasan, alat produksi, dan akses promosi. Pemerintah Kalurahan Triwidadi berupaya memberikan dukungan fisik yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengengakan usahanya saran dan prasarana ini berperan penting dalam mentu pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkuan pemasaran, dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih lagi. Namun, masih terdapat

kendala seperti keterbatasan modal dan minimnya inovasi, yang menyebabkan hasil produksi UMKM belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan untuk keberlanjutan program dan peningkatan dukungan terhadap pelaku UMKM yang lebih menyeluruh dari pemerintah serta kerjasama di lintas sektor.

2. Pembinaan Pemerintah Kalurahan dalam Pengangan UMKM di Bidang Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kalurahan Triwidadi melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM melalui pelatihan, workshop, dan penyuluhan guna untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta kapasitas individu dalam mengelola usahanya. Pembinaan ini mencakup manajemen usaha, pemasaran digital, serta pemanfaatan media sosial untuk promosi produk. Namun, pembinaan ini masih menghadapi hatan seperti rendahnya partisipasi pelaku UMKM, keterbatasan penguasaan teknologi, serta minimnya motivasi belajar terutama pada pelaku usaha usia lanjut. Oleh karena itu, pembinaan sumber daya manusia (SDM) perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing pelaku UMKM agar hasilnya lebih efektif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peniliti di Kalurahan Triwidadi Kabupaten Bantul, maka dari itu peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Triwidadi diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan yang mengajarkan pelaku UMKM cara memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk promosi dan penjualan produk. Misalnya, membuat akun bisnis di instagram, memasarkan produk melalui tik-tok dan lain-lain, serta mengiklankan produk melalui app lainnya.
2. Selain pelatihan digital, pemerintahan juga perlu memberikan pelatihan promosi secara tradisional seperti pembuatan pamflet, strategi promosi langsung ke pelanggan, dan teknik komunikasi bisnis yang menarik, khususnya bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi.
3. Pelatihan dan bimbingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku UMKM, termasuk usia, jenis usaha dan tingkat literasi digital, agar program fasilitas lebih tepat sasaran dan efektif.
4. Pemerintah kalurahan diharapkan memperluas kerjasama dengan lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dan sektor swasta agar pelaku UMKM memperoleh dukungan dalam peningkatan kualitas produk, pemasaran, serta manajemen usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, D. (2021). Strategi Pengangan Kelegaan UMKM (1 Digital). Bintang Pustaka Madani.
- Ahmad Kholik, & Dewi Rahmi. (2023). Strategi Pengangan UMKM Makanan dan Minuman di Kelurahan Tamansari Kota Bandung. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 133–142. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2796>
- Fadilah, A., Syahidah, A. nur'azmi, Risqiana, A., Nurmaulida, A. sofa, Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). Pengangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 892–896. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>
- Fibriyanti, Y. V., Zulyanti, N. R., & Alfiani, A. (2021). Pengangan Umkm Kerajinan Anyaman Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 612–616. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i3.11584>
- Florita, A., Jumiaty, J., & Mubarak, A. (2019). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 143–153. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i1.11>
- Hafsah, M. J. (2004). Upaya Pengangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Infokop*. Nomor 25 Tahun XX
- Komalasari, N. D., Puspaningtyas, A., & Widodo, J. (2022). Pengangan Umkm Sentra Kuliner Desa Pekarungan Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Ekonomi Lokal. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 6(1), 35. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2314>
- Romadhoni, B. R., Akhmad, A., Khalid, I., & Muhsin, A. (2022). Pemberdayaan Umkm Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1074–1088. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2457>
- Siagian, Sondang P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi I. Cetakan Ketiga Belas. Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2003). Menjelaskan penelitian deskriptif.

Tambunan, M. R. (2013). *Pedoman Penyusunan Standard Operating Prosedur*. Jakarta: Penerbit Maiesta Publisher.

Tambunan, T. (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia.

Wulansari, A., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 82–93.

Sumber-Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Desa

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan

Peraturan Daerah Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan

Link:

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kapanewon,_kemantren,_kalurahan,_dan_kelurahan_di_Daerah_Istimewa_Yogyakarta

<https://kumparan.com/ragam-info/mengenal-struktur-organisasi-kelurahan-dan-penjelasan-nya-21dBhzFQyx4>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/265449/perbup-kab-bantul-no-134-tahun-2019>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/256117/perda-kab-bantul-no-9-tahun-2019>

<https://peraturan.go.id/eng/permendagri-no-44-tahun-2016>

https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_20_Tahun_2008_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah.pdf

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
Pendidikan :
Umur :
Jabatan :

Daftar Pertanyaan

A. Bimbingan pemerintahan kalurahan dalam pengengan UMKM di bidang produksi

1. Apakah pemerintahan kalurahan memberikan fasilitas sarana dan prasarana terhadap para pelaku UMKM dalam bentuk apa?
2. Bagaimana cara UMKM mengatasi keterbatasan fasilitas untuk produksi?
3. Bagaimana cara agar pelaku UMKM mendapatkan hasil produk-produk yang berkualitas?
4. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi pemerintahan kalurahan dalam mengembangkan UMKM?
5. Bagaimana pelaku UMKM dapat menghadapi persaingan dari produk-produk sejenis?
6. Apakah pemerintahan kalurahan memberikan motivasi dan memberikan sarana produksi pemasaran?
7. Bagaimana cara pemerintah kalurahan memberikan bimbingan terhadap para pelaku UMKM untuk meningkatkan hasil produksi?

B. Pembinaan pemerintah kalurahan dalam pengengan UMKM di bidang sumber daya manusia

1. Apakah dari pemerintah kalurahan memberikan pendamping terhadap kelompok UMKM dan seperti apa pendampingan yang diberikan?
2. Apakah pemerintah kalurahan memberikan pelatihan atau pembinaan kepada para pelaku UMKM?
3. Apa tantangan utama dalam meningkatkan kualitas SDM UMKM dan

bagaimana cara mengatasinya?

4. Apakah pemerintah kabupaten sudah melakukan pembinaan dan pelatihan yang relevan terkait penguatan SDM UMKM?
5. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi para pelaku UMKM?
6. Bagaimana memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran?
7. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM pelaku UMKM?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi setelah wawancara
dengan Lurah Kalurahan Triwidadi
(28 April 2025)



Dokumentasi setelah wawancara
dengan Ibu Carik Kalurahan Triwidadi
(09 April 2025)



Dokumentasi setelah wawancara
Dengan Pamong Kalurahan Triwidadi
(09 April 2025)



Dokumentasi setelah wawancara
dengan LPMKal Kalurahan
(Ulu-Ulu) Triwidadi (10 April 2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan pelaku UMKM (10 April 2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan pelaku UMKM (13 April 2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan pelaku UMKM (11 April 2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan pelaku UMKM (13 April 2025)



Dokumentasi setelah wawancara
dengan pelaku UMKM (13 April
2025)